



PEMERINTAH  
KABUPATEN JEMBER



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2023

DINAS PERUMAHAN RAKYAT,  
KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember Tahun 2023 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2023. Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember. Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember Tahun 2023.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember Tahun 2023.

Jember, Februari 2024  
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,  
KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA  
KABUPATEN JEMBER



**RAHMAN ANDA, ST, MT, M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19770524 200212 1 008

## DAFTAR ISI

Hal :

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN .....	2
C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI .....	2
D. SUMBER DAYA MANUSIA.....	4
E. ISU STRATEGIS.....	7
BAB II .....	12
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	12
A. RENCANA STRATEGIS .....	12
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT).....	16
C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU).....	19
D. PERJANJIAN KINERJA .....	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	29
A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA.....	29
B. CAPAIAN KINERJA .....	30
B.1 ANALISA REALISASI KINERJA.....	30
B.2 ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN .....	36
B.3 ANALISA PROGRAM – KEGIATAN- SUB KEGIATAN .....	42
B.4 ANALISA ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA .....	58
C. REALISASI ANGGARAN .....	63
BAB IV PENUTUP .....	70
A. KESIMPULAN UMUM PENCAPAIAN KINERJA.....	70
B. PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI PERBAIKAN .....	71

### LAMPIRAN

- Lampiran 1. **Matriks Rencana Strategis (RS) 2021-2026**
- Lampiran 2. **Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023**
- Lampiran 3. **Perjanjian Kinerja Tahun 2023**
- Lampiran 4. **Lampiran SK IKU PD**
- Lampiran 5. **Penghargaan yang diraih selama tahun 2023 (jika ada)**

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember tahun 2023 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember Tahun 2023

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2026, yang meliputi:

1. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Air Bersih
2. Meningkatkan Penataan Ruang yang berkelanjutan
3. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Perumahan layak huni

Capaian Kinerja sasaran tahun 2023 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember tahun 2021-2026, dapat diuraikan sebagai berikut :

**Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan Kualitas Air Minum, Sanitasi layak, kuantitas Sarana dan prasarana Bangunan gedung yang tertata mempunyai 3 indikator kinerja sebagai berikut :**

1. Indikator Prosentase bangunan gedung yang sesuai dengan standart teknis kontruksi yang mempunyai target 96% terealisasi sebesar 90% atau dengan capaian 94% termasuk dalam kategori Sangat Memuaskan.
2. Indikator Persentase rumah tangga berakses air Minum yang mempunyai target 81% terealisasi sebesar 91% atau dengan capaian 113% termasuk dalam

kategori Sangat Memuaskan.

3. Indikator Persentase rumah tangga bersanitasi yang aman yang mempunyai target 84% terealisasi sebesar 84,74% atau dengan capaian 104% termasuk dalam kategori Sangat Memuaskan.

Terlihat bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap Sasaran Meningkatkan Kualitas Air Minum, Sanitasi layak, kuantitas Sarana dan prasarana Bangunan gedung yang tertata dengan 3 Indikator Kinerja Sasaran menunjukkan Predikat **Sangat Memuaskan** yaitu mempunyai Capaian nilai rata-rata 104% dengan 3 Indikator yang mencapai target sesuai yang ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Beberapa hal yang menjadi permasalahan dan perlu diperbaiki untuk rencana kedepan adalah :

1. Masyarakat yang kurang teredukasi tentang penggunaan aplikasi SIMBG dalam pengajuan PBG dan SLF.
2. Kurangnya Monitoring ataupun pengawasan terhadap kesesuaian izin pendirian bangunan.
3. Pelayanan air minum non perpipaan sebagian besar diperdesaan belum teridentifikasi secara kuantitatif maupun kualitatif berdasarkan kondisi air yang dikonsumsi secara mandiri.
4. Berkurangnya debit air dikarenakan banyaknya pembangunan perumahan.
5. Terbatasnya sumber air baku di beberapa daerah.
6. Pengolahan lumpur tinja belum efektif karena masih rendahnya pemanfaatan sarana IPLT yang sudah terbangun.
7. Masih terdapat dan kurang teredukasinya masyarakat yang mempunyai habit BABS (Buang Air Besar Sembarangan).
8. Belum memadainya pelayanan sanitasi yang hal itu akan dapat memberikan kontribusi pencemaran terhadap air permukaan dan air tanah.

Solusi perbaikan terhadap permasalahan ini Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya akan :

1. Mengadakan Sosialisasi kepada masyarakat melalui Kecamatan sebagai kepanjangan tangan dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas SDM Pengelola Pelayanan Air Minum dan peran serta seluruh Stake holder dalam upaya mencapai sasaran pembanguna air minum

dipekotaan dan diperdesaan.

3. Mendorong terbentuknya regionalisasi pengelolaan air minum sebagai upaya meningkatkan efisiensi pelayanan dan efisiensi pemanfaatan sumber air baku.
4. Meningkatkan kualitas IPLT sebagai pengelolaan air limbah.
5. Menciptakan iklim yang kondusif untuk berperan serta dalam meningkatkan pelayanan air limbah yang layak untuk masyarakat.
6. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak dari BABS (Buang Air Besar Sembarangan).

**Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan mempunyai 2 indikator kinerja sebagai berikut :**

1. Indikator Prosentase kesesuaian rencana tata ruang mempunyai target 84% terealisasi sebesar 85% atau dengan capaian 101% termasuk dalam kategori Sangat Memuaskan.
2. Indikator Prosentase Penata gunaan tanah mempunyai target 50% teralisasi sebesar 70% atau dengan capaian 140% termasuk dalam kategori Sangat Memuaskan.

Terlihat bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap Sasaran Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan dengan 2 Indikator Kinerja Sasaran menunjukkan Predikat **Sangat Memuaskan** yaitu mempunyai Capaian nilai rata-rata 120% dengan 2 Indikator yang mencapai target sesuai yang ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Beberapa hal yang menjadi pemasalahan dan perlu diperbaiki untuk rencana kedepan adalah :

1. Belum ditetapkannya Perda RTRW Kabupaten Jember sebagai dokumen integrasi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
2. Kurangnya pemanfaatan masyarakat terhadap pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang wilyah.

Solusi perbaikan terhadap pemasalah ini Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya akan :

1. Percepatan Penetapan Perda RTRW Kabupaten Jember.
2. Sosialisasi kepada masyarakat tentang pemnfaatan ruang yang sesuai denganrencana tata ruang melalui konsultasi publik.

**Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan Kualitas dan kuantitas perumahan dan permukiman yang layak mempunyai 2 indikator kinerja sebagai berikut :**

1. Indikator Luasan permukiman kumuh di kawasan perumahan dan permukiman yang tertangani mempunyai target 202,9ha terealisasi sebesar 202,9ha atau dengan capaian 102% termasuk dalam kategori Sangat Memuaskan.
2. Indikator Persentase rumah layak huni mempunyai target 91% terealisasi sebesar 95% atau dengan capaian 104% termasuk dalam kategori Sangat Memuaskan.

Terlihat bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap Sasaran Meningkatkan Kualitas dan kuantitas perumahan dan permukiman yang layak dengan 2 Indikator Kinerja Sasaran menunjukkan Predikat **Sangat Memuaskan** yaitu mempunyai Capaian nilai rata-rata 102% dengan 2 Indikator yang mencapai target sesuai yang ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Beberapa hal yang menjadi pemasalahan dan perlu diperbaiki untuk rencana kedepan adalah :

1. Terbatasnya akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam memenuhi kebutuhan rumah layak huni.
2. Belum memadainya prasarana dan sarana dasar lingkungan perumahan dan permukiman sehingga menurunnya kualitas lingkungan permukiman dan meningkatnya luasan kawasan kumuh.
3. Terbatasnya penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman di desa tertinggal di Kabupaten Jember.

Solusi perbaikan terhadap pemasalah ini Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya akan :

1. Peningkatan pemnuhan rumah kayak huni bagi seluruh masyarakat khususnya masyarakat berpenghasailan rendah (MBR).
2. Upaya penataan lingkungan dan pemenuhan sarana dan prasarana dikawasan permukiman sehingga kualitas lingkungan permukiman meningkat dan luasan kawasan kumh berkurang.
3. Menigkatkan pembangunan prasaran dan sarana dasar permukiman di desa tertinggal di Kabupaten Jember.

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2023 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar 83% merupakan Belanja Operasional atau sebesar Rp 133.890.498.450,- dan Belanja Modal sebesar 17% atau sebesar Rp 28.090.395.152,-

Sedangkan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp 151.648.086.860,- atau 94% dari pagu anggaran. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 yang disampaikan dibawah ini merupakan data sementara dan belum diaudit oleh BPK. Dari analisis yang dilakukan Ada efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk pencapaian kinerja yang disebabkan pada sasaran Meningkatkan Kualitas Air Minum, Sanitasi layak, kuantitas Sarana dan prasarana Bangunan gedung yang tertata capaian kinerja sebesar 104% dengan serapan anggaran 93%.

Pada Sasaran Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan capaian kinerja sebesar 120% dengan serapan anggaran 72%.

Dan pada sasaran Meningkatkan Kualitas dan kuantitas perumahan dan permukiman yang layak capaian kinerja 102% dengan serapan anggaran 91%.

Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaporan dan pengukuran target-target sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2023 antara lain:

1. Hambatan dan Permasalahan pada Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Air Minum, Sanitasi layak, kuantitas Sarana dan prasarana Bangunan gedung yang tertata yaitu :
  - 1) Masyarakat yang kurang teredukasi tentang penggunaan aplikasi SIMBG dalam pengajuan PBG dan SLF.
  - 2) Kurangnya Monitoring ataupun pengawasan terhadap kesesuaian izin pendirian bangunan.
  - 3) Pelayanan air minum non perpipaan sebagian besar diperdesaan belum teridentifikasi secara kuantitatif maupun kualitatif berdasarkan kondisi air yang dikonsumsi secara mandiri.
  - 4) Berkurangnya debit air dikarenakan banyaknya pembangunan perumahan.

- 5) Terbatasnya sumber air baku di beberapa daerah.
  - 6) Pengolahan lumpur tinja belum efektif karena masih rendahnya pemanfaatan sarana IPLT yang sudah terbangun.
  - 7) Masih terdapat dan kurang tereduksinya masyarakat yang mempunyai hebit BABS (Buang Air Besar Sembarangan).
  - 8) Belum memadainya pelayanan sanitasi yang hal itu akan dapat memberikan kontribusi pencemaran terhadap air permukaan dan air tanah.
2. Hambatan dan Permasalahan pada Sasaran Strategis Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan, yaitu :
- 1) Belum ditetapkannya Perda RTRW Kabupaten Jember sebagai dokumen integrasi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
  - 2) Kurangnya pemanfaatan masyarakat terhadap pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
3. Hambatan dan Permasalahan pada Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas dan kuantitas perumahan dan permukiman yang layak, yaitu :
- 1) Terbatasnya akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam memenuhi kebutuhan rumah layak huni.
  - 2) Belum memadainya prasarana dan sarana dasar lingkungan perumahan dan permukiman sehingga menurunnya kualitas lingkungan permukiman dan meningkatnya luasan kawasan kumuh.
  - 3) Terbatasnya penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman di desa tertinggal di Kabupaten Jember.

Beberapa rekomendasi perbaikan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di tahun 2023 antara lain :

1. Solusi Perbaikan untuk permasalahan pada Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Air Minum, Sanitasi layak, kuantitas Sarana dan prasarana Bangunan gedung yang tertata, yaitu :
  - 1) Mengadakan Sosialisasi kepada masyarakat melalui Kecamatan sebagai kepanjangan tangan dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya untuk memberikan informasi dan edukasi kepada

masyarakat.

- 2) Meningkatkan kualitas SDM Pengelola Pelayanan Air Minum dan peran serta seluruh Stake holder dalam upaya mencapai sasaran pembanguna air minum dipekotaan dan diperdesaan.
  - 3) Mendorong terbentuknya regionalisasi pengelolaan air minum sebagai upaya meningkatkan efisiensi pelayanan dan efisiensi pemanfaatan sumber air baku.
  - 4) Meningkatkan kualitas IPLT sebagai pengelolaan air limbah.
  - 5) Menciptakan iklim yang kondusif untuk berperan serta dalam meningkatkan pelayanan air limbah yang layak untuk masyarakat.
  - 6) Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak dari BABS (Buang Air Besar Sembarangan).
2. Solusi Perbaikan untuk permasalahan pada Sasaran Strategis Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan, yaitu :
- 1) Percepatan Penetapan Perda RTRW Kabupaten Jember.
  - 2) Sosialisasi kepada masyarakat tentang pemnfaatan ruang yang sesuai denganrencana tata ruang melalui konsultasi publik.
3. Solusi Perbaikan untuk permasalahan pada Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas dan kuantitas perumahan dan permukiman yang layak, yaitu :
- 1) Peningkatan pemnuhan rumah kayak huni bagi seluruh masyarakat kususny masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
  - 2) Upaya penataan lingkungan dan pemenuhan sarana dan prasarana dikawasan permukiman sehingga kualitas lingkungan permukiman meningkata dan luasan kawasan kumh berkurang.
  - 3) Menigkatkan pembangunan prasaran dan sarana dasar permukiman di desa tertinggal di Kabupaten Jember.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Terselenggaranya Good Governance merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacupeningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember

Kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember tahun 2023

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember adalah

- sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember
- sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik

## **C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA KABUPATEN JEMBER**

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 30 tahun 2023 sebagai berikut :

(2) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta urusan pemerintahan di bidang pertanahan.

(3) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(4) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta bidang Pertanahan.

(5) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi

- a. Perumusan kebijakan dalam menyusun program urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang terdiri dari sub urusan air minum, sub urusan air limbah, sub urusan drainase, sub urusan permukiman, sub urusan bangunan gedung, sub urusan penataan bangunan gedung dan lingkungan, sub urusan jasa konstruksi dan sub urusan penataan ruang;
- b. Perumusan kebijakan dalam penyusunan program perumahan dan kawasan permukiman yang terdiri dari sub urusan perumahan, sub urusan kawasan permukiman, sub urusan perumahan dan kawasan permukiman kumuh, sub urusan, sub urusan sarana, prasarana, dan utilitas umum, sub urusan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- c. Perumusan kebijakan dalam penyusunan program pertanahan;
- d. Pelaksanaan kebijakan urusan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang kawasan perumahan dan permukiman dan bidang pertanahan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang kawasan perumahan dan permukiman dan bidang pertanahan;
- f. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsi serta tugas pembantuan.

(6) Susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  2. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan.
- c. Bidang Jasa Konstruksi, Penataan Bangunan Perumahan dan Pengembangan Kawasan Permukiman, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Tata Ruang dan Pertanahan, membawahi :
  1. Seksi Pertanahan
  2. Kelompok Jabatan Fungsional
- f. UPTD; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **D. SUMBER DAYA MANUSIA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA KABUPATEN JEMBER**

Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember terdiri dari 86 ASN dan 224 Non ASN . Berikut merupakan perincian sumber daya manusia pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah ASN Dinas Perumahan Rakyat**  
**Kawasan Permukiman dan Cipta Karya**  
**Kabupaten Jember**  
**berdasarkan Jabatan**  
**periode Januari-Desember 2023**

<b>No</b>	<b>Nama Jabatan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Keterangan</b>
1	Kepala Dinas	1	
2	Sekretaris	1	
3	Kabid. Tata Ruang dan Pertanahan	1	
4	Kabid. Jakon, Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	1	
5	Kabid. Prasarana Sarana dan Utilitas Umum	1	
6	Kasie. Pertanahan	1	
7	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	4	
8	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	1	
9	Kasubag. Keuangan Perencanaan dan Pelaporan	1	
10	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	2	
11	Penata Ahli Muda	2	
12	Pengawas Bangunan dan Gedung	1	
13	Penata Bangunan Gedung dan Permukiman	1	
14	Bendahara Pengeluaran	1	
15	Pengadministrasi Keuangan	3	
16	Pengadministrasi Kepegawaian	3	
17	Pengadminstrasi Umum	10	
18	Pemelihara Penerangan Jalan	10	
19	Pemelihara Sarana dan Prasarana	8	
20	Petugas Keamanan	9	
21	Pramu Bakti	2	
22	Pramu Taman	20	
23	Pramu Pemakaman	2	
	<b>Jumlah</b>	<b>86</b>	

**Tabel 1.2**  
**Jumlah ASN Dinas Perumahan Rakyat Kawasan**  
**Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember**  
**berdasarkan Pangkat/ Golongan Ruang**  
**periode Januari-Desember 2023**

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Pembina Tingkat I	IV/b	1
2	Pembina	IV/a	2
3	Penata Tingkat I	III/d	12
4	Penata	III/c	3
5	Penata Muda Tingkat I	III/b	-
6	Penata Muda	III/a	8
7	Pengatur Tingkat I	II/d	22
8	Pengatur	II/c	2
9	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	9
10	Pengatur Muda	II/a	3
11	Juru Tingkat I	I/d	23
12	Juru	I/c	1
13	Juru Muda Tingkat I	I/b	-
	<b>Jumlah</b>		<b>86</b>

**Tabel 1.3**  
**Jumlah ASN dan Non ASN Dinas Perumahan**  
**Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya**  
**Kabupaten Jember**  
**berdasarkan Latar Belakang Pendidikan**  
**periode Januari-Desember 2023**

No	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	SD	24	ASN
2	SLTP	9	ASN
3	SMA/STM	33	ASN
4	D3	-	ASN
5	S1	17	ASN
6	S2	3	ASN
7	SD	15	Non ASN
8	SLTP	15	Non ASN
9	SMA/STM	142	Non ASN
10	D1	1	Non ASN

11	D3	8	Non ASN
12	S1	40	Non ASN
13	S2	3	Non ASN
<b>Jumlah</b>		<b>310</b>	

## E. ISU STRATEGIS

Terdapat beberapa isu strategis yang harus diperhatikan dalam menghadapi tantangan pelaksanaan tugas pokok fungsi dan pelaksanaan program kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember, yaitu:

1. Isu Strategis Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
  - Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni dan terjangkau.
  - Menurunnya kualitas bangunan rumah dan lingkungan permukiman sehingga tumbuh kawasan kumuh di perkotaan
  - Mitigasi bencana dan penanganan pasca bencana dan relokasi permukiman akibat bencana
2. Isu Strategis Bidang Keciaptakaryaan dan Penataan Ruang
  - Belum optimalnya pelayanan air minum dan sanitasi khususnya di kawasan strategis Provinsi, kawasan kumuh dan rawan air
  - Masih terdapat daerah-daerah yang terdampak kekeringan terutama di musim kemarau. Hal ini menjadi tugas penting bagi pemerintah untuk dapat mengentaskan persoalan penyediaan air bersih dimasyarakat. Berkerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya melakukan pengentasan permasalahan air minum.
  - Belum Optimalnya pelayanan air minum dan sanitasisecara regional
  - Penurunan kapasitas air baku serta pemanfaatan air baku untuk berbagai kepentingan
  - Kecepatan pembangunan sarana prasarana air minum dan sanitasi belum dapat mengimbangi pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi.
  - Kebutuhan pokok minimal manusia akan air bersih adalah 60

liter/orang/hari. Hal tersebut harus didukung oleh SPAM perpipaan dan bukan jaringan perpipaan yang terlindungi (sesuai dengan standar teknis yang berlaku) dengan penyelenggara baik BUMN, BUMD, swasta, koperasi, maupun kelompok masyarakat. Dengan dasar kebutuhan pokok air bersih minimal 60 liter/orang/hari, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember berharap dapat meningkatkan cakupan pelayanannya dengan menerapkan program dan kegiatan yang tepat sasaran.

- Perluasan pemangku kepentingan dalam pembangunan dan pengelolaan sarana prasarana air minum dan sanitasi
- Optimalisasi pemanfaatan air minum regional dalam rangka pencapaian target SPM untuk sektor Air Minum dan Sanitasi.
- Pergeseran pusat kegiatan lokal wilayah di Jember
- TPA yang belum memadai dan belum memiliki pengelolaan yang baik
- Perubahan luasan lahan tidak terbangun menjadi lahan terbangun yang signifikan, khususnya lahan pertanian dan hutan lindung
  
- Belum adanya kesepakatan luasan lahan untuk LP2B sebagai salah satu substansi dalam Revisi RTRW
- Belum ada kejelasan mekanisme insentif yang diterima petani terkait penetapan lahan menjadi LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan);
- Kawasan rawan bencana likuifaksi di wilayah selatan Jember
- Ditemukannya lokasi potensial untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata baru

### 3. Isu Strategis Bidang Pertanahan

- Reforma Agraria (*Land Reform*) di hamparan tanah lintas Kabupaten/Kota belum tertangani dengan optimal

### 4. Isu Strategis Percepatan Penerapan SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar pada SPM pekerjaan umum daerah kabupaten/kota terdiri atas :

- a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Sedangkan jenis pelayanan dasar pada SPM perumahan rakyat daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota

Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana alam ditentukan setelah terjadinya bencana dan ditargetkan sesuai dengan rencana aksi akan paling lama diselesaikan dalam kurun waktu 3 tahun anggaran dengan dua tahap pelaksanaan yaitu persiapan (Pembentukan Satuan tugas penanganan rumah korban bencana, Penetapan fasilitator dan pendamping masyarakat, Pembentukan kelompok masyarakat, Terdatanya kebutuhan rumah yang layak huni bagi korban bencana, Tersusunnya rencana aksi penyediaan rumah bagi korban bencana) dan pelaksanaan pembangunan rumah layak huni bagi korban bencana.

- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota

Tingkat keberhasilan Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Daerah kabupaten/ kota ditentukan dari presentase (%) jumlah rumah yang telah tersedia/terbangun dan dimanfaatkan terhadap rumah keseluruhan yang seharusnya disediakan dalam rangka memfasilitasi masyarakat yang terkena program pemerintah.

Dasar Penyediaan Rumah Layak Huni bagi korban bencana dan relokasi program pemerintah adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan prioritas dan menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk dapat memberikan bantuan kepada masyarakat yang lebih menderita dan lebih memerlukan
- b. Kesepakatan masyarakat dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan, kearifan lokal dan kegotong royongan menjadi dasar untuk melakukan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat korban bencana dan terkena relokasi program pemerintah
- c. Memberikan stimulan agar masyarakat bergotong royong menyediakan

rumah layak huni dan ramah bencana serta mengutamakan kepada masyarakat yang terkena bencana dan dan tidak mampu dari segi pembiayaan

- d. Keswadayaan masyarakat yaitu dalam pelaksanaan perbaikan/rehabilitasi rumah dapat dikerjakan sendiri atau secara gotong-royong, dan sekiranya dikerjakan dengan memanfaatkan tenaga sendiri, dan bila pengerjaan tidak dapat dikerjakan sendiri atau dengan gotong royong maka dapat menggunakan tukang yang profesional atas beban biaya sendiri.
- e. Memberi pengenalan dan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan pembangunan/penyediaan rumah layak huni yang bertumpu pada masyarakat.

#### 5. Isu Strategis Kesetaraan Gender

Bidang infrastruktur pada umumnya didominasi oleh laki-laki karena secara jumlah, teknisi laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Hal tersebut membuat peran perempuan di bidang ini, khususnya sebagai pengguna infrastruktur, kurang mendapatkan perhatian. Padahal, dengan meningkatkan kepekaan gender dalam pembangunan infrastruktur, perempuan dapat merasa nyaman sebagai pengguna infrastruktur.

Di bidang transportasi misalnya, hal-hal kecil, seperti pegangan di dalam unit bus yang terlalu tinggi, membuat perempuan merasa risih. Jika infrastruktur dibangun atau diadakan dengan kepekaan terhadap isu gender, maka hal-hal seperti ini bisa dihindari. Penyediaan ruang laktasi di gedung, taman penitipan anak, lingkungan yang juga didesain ramah bagi penyandang difabel dengan dibangunnya jalur landai dan jalur kuning tuna netra di area pejalan kaki dan memiliki taman dengan bangku-bangku sebagai ruang terbuka hijau adalah beberapa hal yang mendesak dilakukan dalam rangka penerapan kesetaraan gender ini. Bahkan sampai pada hal-hal internal pemerintahan seperti penentuan pejabat. Keterlibatan perempuan juga wajib diperhitungkan dan beri kesempatan seluas-luasnya meskipun secara rasio pegawai laki-laki lebih besar dari pada pegawai perempuan.

Dalam kaitan gender dengan permukiman, akses informasi perempuan terbatas mengenai pengelolaan hunian, sampah, limbah,

mekanisme bantuan rumah layak huni, dsb. Anak-anak di permukiman padat/kumuh sulit mendapatkan akses ruang bermain. Selain itu partisipasi perempuan, lansia, dan difabel dalam perencanaan permukiman masih rendah.

Banyaknya kasus kekerasan yang terjadi di permukiman kumuh dan terjadi pada wanita dan anak-anak sebagai korban kekerasan menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan hasil yang disebabkan oleh factor internal seperti :

- Belum adanya panduan penyelenggaraan infrastruktur yang mempertimbangkan isu-isu gender di dalamnya
- Belum diintegrasikannya isu kekerasan di lingkungan permukiman dalam perencanaan pembangunan infrastruktur
- Penggunaan data terpilah dalam perencanaan permukiman belum optimal
- Data-data kekerasan belum menjadi pertimbangan dalam penyelenggaraan permukiman
- Analisis gender belum sepenuhnya terinternalisasi dalam tahap-tahap penyelenggaraan permukiman
- Belum efektifnya sinergi antar berbagai sector pembangunan dalam penanganan permukiman kumuh.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS**

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Rencana strategis Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) tahun 2021-2026

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Jember , penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember mengacu pada RPJMD dengan merujuk pada Misi ke 6 dan tujuan ke 1 dan sasaran ke 2 dan 3 yaitu

Misi ke 6 : Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember

Tujuan 1 : Menyediakan infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata serta berperspektif kebencanaan

Sasaran 2 : Meningkatnya sarana permukiman masyarakat yang berkualitas dan merata

Sasaran 3 : Meningkatnya utilitas permukiman masyarakat yang merata dan berkualitas

Yang kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran dan indikator serta target jangka menengah dan tahunan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan

Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember sebagaimana termuat didalam rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 secara terperinci sebagai berikut :

**MATRIKS TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS (DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA) TAHUN 2021-2026  
(SEBELUM PERUBAHAN)**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Sebelum Perubahan</b>									
1.	Meningkatkan Kualitas dan kuantitas Infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang untuk pemenuhan pelayanan publik		Persentase capaian pelayanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman						
		1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan merata	a. Persentase rumah layak huni	55	56				
			b. Luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan yang tertangani	538,27	124,25				
			c. Persentase rumah tangga berakses air bersih yang layak	74	78				
			d. Persentase rumah tangga bersanitasi yang aman	80	82				
		2. Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan	a. Persentase kesesuaian rencana tata ruang	64	75				
			b. Tersedianya rencana rinci untuk pedoman pengendalian pemanfaatan ruang	3	8				
			c. luasan ruang terbuka hijau publik	700	825				
			d. Persentase luas lahan bersertifikat	39	48				

**MATRIKS TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS (DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA) TAHUN 2021-2026 (SETELAH PERUBAHAN, TERTUANG DALAM PERATURAN BUPATI JEMBER NO. TAHUN 2023)**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Setelah Perubahan</b>									
1.	Meningkatkan Kualitas dan kuantitas Infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang untuk pemenuhan pelayanan publik	1. Meningkatkan Kualitas Air Minum, Sanitasi layak, kuantitas Sarana dan prasarana Bangunan gedung yang tertata	1. Prosentase bangunan gedung yang sesuai dengan standart teknis kontruksi			96	97	98	99
			2. Persentase rumah tangga berakses air Minum			81	84	87	90
			3. Persentase rumah tangga bersanitasi yang aman			84	86	88	90
		2. Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan	1. Prosentase kesesuaian rencana tata ruang			84	91	96	100
			2. Prosentase Penataan tanah			50	64	72	80
		3. Meningkatkan Kualitas dan kuantitas perumahan dan permukiman yang layak	1. Luasan permukiman kumuh di kawasan perumahan dan permukiman yang tertangani			202,9	150,8	124	100
			2. Persentase rumah layak huni			91	92	93	94

Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas dan kuantitas Infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang untuk pemenuhan pelayanan publik

Indikator Tujuan : Persentase capaian pelayanan infrastruktur dasar

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Kualitas Air Minum, Sanitasi layak, kuantitas Sarana dan prasarana Bangunan gedung yang tertata	1. Prosentase bangunan gedung yang sesuai dengan standart teknis kontruksi	94%	95%	96%	97%	98%	99%
	2. Persentase rumah tangga berakses air Minum	74%	78%	81%	84%	87%	90%
	3. Persentase rumah tangga bersanitasi yang aman	80%	82%	84%	86%	88%	90%
Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan	1. Prosentase kesesuaian rencana tata ruang	64%	75%	84%	91%	96%	100 %
	2. Prosentase Penata gunaan tanah	39%	48%	50%	64%	72%	80 %

Meningkatkan Kualitas dan kuantitas perumahan dan permukiman yang layak	1. Luasan permukiman kumuh di kawasan perumahan dan permukiman yang tertangani	538,27 ha	124,25 ha	202,9 ha	150,8 ha	124 ha	100 ha
	2. Persentase rumah layak huni	55%	90%	91%	92%	93%	94%

Sumber data : tabel Tc. 25 pada Rencana Strategis Perubahan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember tahun 2021-2026

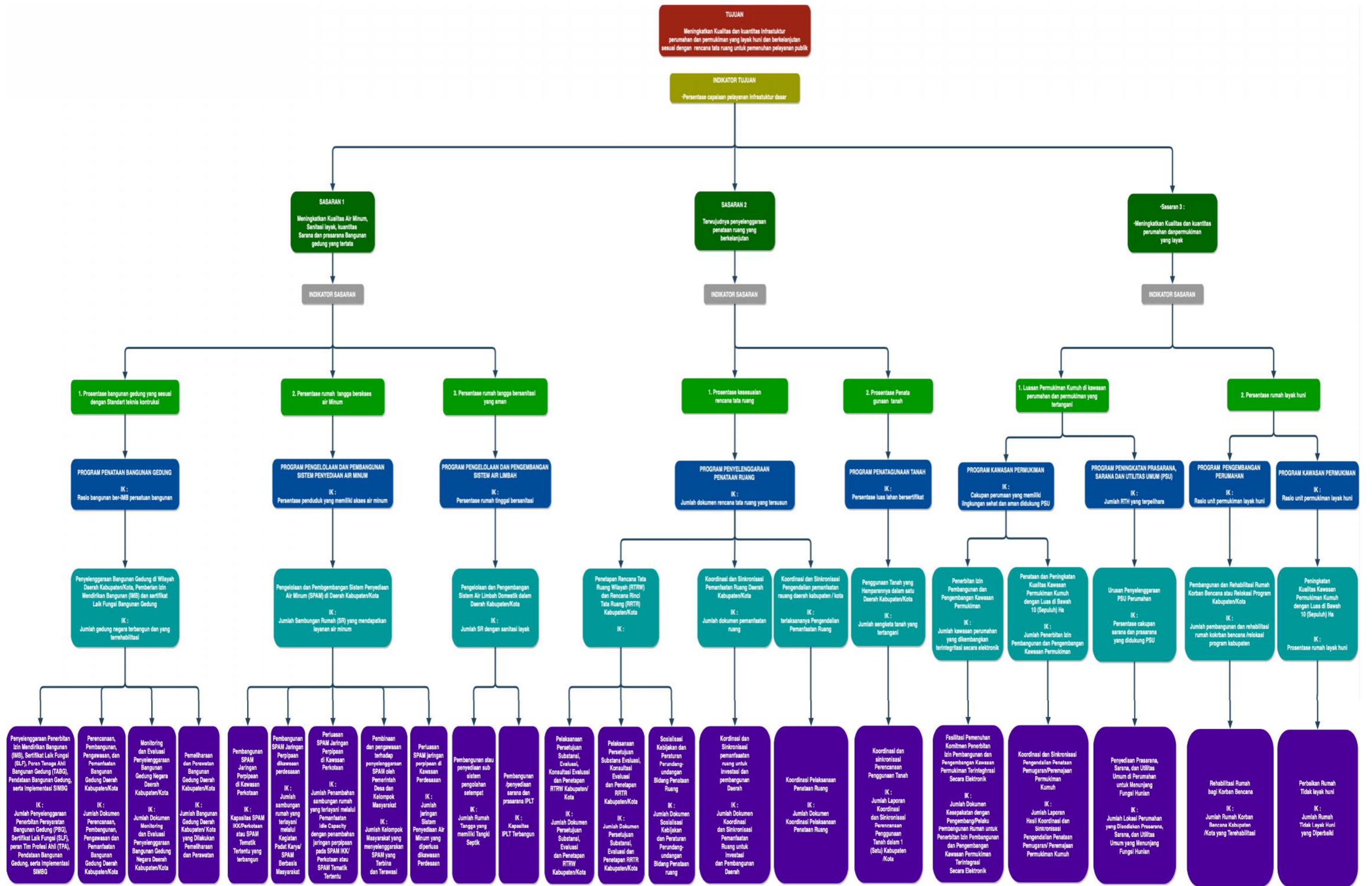
## **B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2023**

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember Kabupaten Jember melalui berbagai program/ kegiatan/ sub kegiatan di tahun 2023.

Dokumen rencana kinerja ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2023, indikator kinerja sasaran, dan target sasarannya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Sasaran yang dimaksud dalam Rencana Kinerja tahunan adalah sasaran yang dimuat dalam dokumen renstra Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember Melalui rumusan yang lebih spesifik dan terukur.

Matriks hubungan sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan pendukung pencapaian target sasaran, tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana terlampir.

Cascading Kinerja berdasarkan dokumen perencanaan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :



### C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (core business) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember Nomor 065/243/35.09.33 Tahun 2023;

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi dan Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatkan Kualitas Air Minum, Sanitasi layak, kuantitas Sarana dan prasarana Bangunan gedung yang tertata	1. Prosentase bangunan gedung yang sesuai dengan standart teknis kontruksi	<p><b>Formulasi :</b></p> $\frac{\text{Jumlah bangunan gedung yang sesuai dengan standart teknis}}{\text{Jumlah bangunan gedung yang Mengajukan ijin PBG dan SLF}} \times 100\%$ <p><b>Penjelasan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Standar teknis bangunan gedung berpedoman pada Permen PUPR No. 20 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung Fungsi Khusus</li> <li>Ijin PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, memperluas, mengurangi, dan/atau</li> </ol>	Bidang Jasa Konstruksi, Penataan Bangunan Perumahan dan Pengembangan Kawasan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi dan Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
		merawat bangunan gedung sesuai teknis Bangunan Gedung 3. Ijin SLF adalah proses sertifikasi yang akan dilakukan untuk bangunan yang baru selesai dibuat		
	2. Persentase rumah tangga berakses air Minum	<p><b>Formulasi :</b></p> $\frac{\text{Jumlah KK yang memiliki sarana air minum}}{\text{Jumlah KK di Kabupaten Jember}} \times 100\%$ <p><b>Penjelasan:</b></p> <p>1. KK yang memiliki sarana air minum adalah KK yang dapat mengakses air minum melalui sarana langsung di Rumah. Berdasarkan pada permenpupr No. 13 Tahun 2023.</p> <p>2. Sarana air minum meliputi semua infrastruktur, peralatan dan sistem yang digunakan untuk menyediakan air minum yang layak dan aman kepada masyarakat. Sarana</p>	Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi dan Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
		air minum meliputi : Sumber air, instalasi pengelolaan air, sistem distribusi jaringan pipa, pompa air, bangunan dan struktur yang digunakan untuk mendukung pengelolaan instalasi air, tangki penyimpanan dan infrastruktur lainnya.		
	3. Persentase rumah tangga bersanitasi yang aman	<p><b>Formulasi :</b></p> $\frac{\text{Jumlah KK bersanitasi layak}}{\text{Jumlah KK penduduk Jember}} \times 100\%$ <p><b>Penjelasan :</b></p> <p>KK yang bersanitasi layak adalah KK yang memiliki fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain kloset menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangki septik atau sistem pengolahan air limbah (SPAL)/ Sistem Terpusat. Adapun kriteria sanitasi layak yaitu : Jamban sehat harus tertutup dinding dan atap, Saluran pembuangan air kotor yang ada di dapur atau</p>	Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi dan Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
		<p>tempat cuci dialirkan menuju selokan atau saluran kota, Saluran pembuangan air dari kloset langsung dialirkan menuju septic tank, Posisi septic tank harus lebih rendah dari kloset agar kotoran mudah masuk ke dalamnya. Selain itu memiliki saluran udara agar septic tank tidak meledak.</p> <p>Berpedoman pada permenpupr No. 13 Tahun 2023.</p>		
Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan	1. Prosentase kesesuaian rencana tata ruang	<p><b>Formulasi :</b></p> $\frac{\text{Realisasi RTRW}}{\text{Rencana Tata Ruang Wilayah}} \times 100\%$ <p><b>Penjelasan :</b></p> <p>1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah wujud susunan dari suatu tempat kedudukan yang berdimensi luas dan isi dengan memperhatikan struktur dan pola dari tempat tersebut.</p>	Bidang Ruang Pertanahan Tata dan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi dan Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
		<p>Berpedoman pada Perda RTRW Kabupaten Jember No. 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember.</p> <p>2. Realisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merujuk pada implementasi atau pelaksanaan rencana tata ruang yang telah disusun oleh pemerintah daerah</p>		
	<p>2. Prosentase Penata gunaan tanah</p>	<p><b>Formulasi :</b></p> $\frac{\text{Jumlah sertifikasi hak milik (SHM)}}{\text{Jumlah bidang tanah}} \times 100\%$ <p><b>Penjelasan:</b></p> <p>1. Sertifikat Hak Milik adalah bukti kepemilikan penuh atas tanah dan/atau bangunan. Di dalam SHM, terdapat keterangan nama pemilik, luas tanah, lokasi properti, gambar bentuk tanah, nama objek atau tetangga pemilik tanah yang berbatasan langsung, tanggal penetapan sertifikat, nama dan tanda</p>	<p>Bidang Ruang Pertanahan</p> <p>Tata dan</p>	<p>Dinas Perumahan Rakyat, Kawsan Permukiman dan Cipta Karya</p>

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi dan Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
		tangan pejabat yang bertugas, serta cap stempel sebagai bukti keabsahan sertifikat. SHM hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia.		
Meningkatkan Kualitas dan kuantitas perumahan dan permukiman yang layak	1. Luasan permukiman kumuh di kawasan perumahan dan permukiman yang tertangani	<p><b>Formulasi:</b> Jumlah Luasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang tertangani</p> <p><b>Penjelasan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. Sedangkan Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat</li> <li>2. Perumahan dan permukiman kumuh yang tertangani adalah perumahan yang sudah meningkat kualitas fungsi sebagai tempat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bidang Jasa Konstruksi, Penataan Bagnunan Perumahan dan Pengembangan Kawasan</li> <li>2. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum</li> </ol>	Dinas Perumahan Rakyat, Kawsan Permukiman dan Cipta Karya

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi dan Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
		<p>hunian.</p> <p>Berpedoman pada Permen PUPR No. 14 / PRT/M/2018 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh</p>		
	2. Persentase rumah layak huni	<p><b>Formulasi :</b></p> $\frac{\text{Jumlah Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah bangunan Rumah}} \times 100\%$ <p><b>Penjelasan :</b></p> <p>1. Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni.</p> <p>Kriteria Rumah Layak Huni harus memenuhi persyaratan-persyaratan berikut, yakni :</p> <p>Keselamatan bangunan meliputi: struktur bawah/pondasi; struktur tengah/kolom dan balok dan struktur atas.</p> <p>Kesehatan meliputi pencahayaan,</p>	2 Bidang Jasa Konstruksi, Penataan Bagnunan Perumahan dan Pengembangan Kawasan	Dinas Perumahan Rakyat,Kawsan Permukiman dan Cipta Karya

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi dan Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
		<p>penghawaan, dan sanitasi.</p> <p>Kecukupan luas minimum 7,2 m<sup>2</sup> – 12 m<sup>2</sup> /orang.</p> <p>Berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2020 tentang Perumahan dan Permukiman.</p>		

#### D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indicator sasaran Perangkat Daerah sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan (dokumen PK terlampir)

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember Tahun 2023 dicantumkan sasaran-sasaran strategis dinas, indikator kinerja utama, target kinerja, dan program-program utama serta anggaran yang disediakan untuk mewujudkan sasaran. Perjanjian kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember tahun 2023 telah memuat target sebagaimana target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember tahun 2021-2026.

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET TAHUN 2023</b>
1	Meningkatkan Kualitas Air Minum, Sanitasi layak, kuantitas Sarana dan prasarana Bangunan gedung yang tertata	➤ Prosentase bangunan gedung yang sesuai dengan standart teknis kontruksi	96%
		➤ Persentase rumah tangga berakses air Minum	81%
		➤ Persentase rumah tangga bersanitasi yang aman	84%
2	Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan	➤ Prosentase kesesuaian rencanatata ruang	84%
		➤ Prosentase Penatagunaan tanah	50%

3	Meningkatkan Kualitas dan kuantitas perumahan dan permukiman yang layak	➤ Luasan permukiman kumuh di kawasan perumahan dan permukiman yang tertangani	202,9 ha
		➤ Persentase rumah layak huni	91%

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember didukung dengan anggaran 11 program tahun 2023 sebesar Rp 161.980.893.602,- (Seratus enam puluh satu milyar sembilan ratus delapan puluh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus dua rupiah)

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran capaian indicator kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai	Interpretasi
1.	AA	➤ 90 - 100	Sangat Memuaskan
2.	A	➤ 80 - 90	Memuaskan
3.	BB	➤ 70 - 80	Sangat Baik
4.	B	➤ 60 - 70	Baik
5.	CC	➤ 50 - 60	Cukup (mamadai)
6.	C	➤ 30 - 50	Kurang
7.	D	➤ 0 - 30	Sangat Kurang

2. Penetapan angka capaian kinerja sasaran yang mencapai angka lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja 100%. Angka capaian kinerja sasaran yang mencapai angka kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja 0.

3. Cara menghitung prosentase capaian indicator kinerja adalah :

- a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress positif**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress negative**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

## **B. CAPAIAN KINERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA KABUPATEN JEMBER**

### **B.1 ANALISA REALISASI KINERJA**

Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember tahun 2021-2026 . Jumlah tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah sebanyak 1 Tujuan, 3 sasaran dan 7 indicator sasaran. Berikut adalah capaian sasaran strategis pada tahun 2023

Tabel 3.1  
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Kualitas Air Minum, Sanitasi layak, kuantitas Sarana dan prasarana Bangunan gedung yang tertata	1. Prosentase bangunan gedung yang sesuai dengan standart teknis kontruksi	96%	90%	94%
		2. Persentase rumah tangga berakses air Minum	81%	91%	113%
		3. Persentase rumah tangga bersanitasi yang aman	84%	87,74%	104%
2	Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan	1. Prosentase kesesuaian rencana tata ruang	84%	85%	101%
		2. Prosentase penatagunaan tanah	50%	70%	140%
3	Meningkatkan Kualitas dan kuantitas perumahan dan permukiman yang layak	1. Luasan permukiman kumuh di kawasan perumahan dan permukiman yang tertangani	202,9 ha	202,9 ha	100%
		2. Persentase rumah layak huni	91%	95%	104%
Rata Rata Capaian					108%

Sumber Data: Dinas PRKP dan Cipta Karya

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian (7) indikator sasaran Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember rata rata mencapai 108% dan masuk dalam kategori AA. Dengan demikian maka secara umum Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember telah melaksanakan tugas pokok fungsi dalam bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta bidang Pertanahan secara baik dalam rangka mencapai tujuan

organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember tahun 2021 -2026

Selanjutnya untuk mengetahui pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

**Tabel 3.2**  
**Perbandingan Capaian kinerja Sasaran tahun 2023 dengan tahun sebelumnya**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET			REALISASI		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatkan Kualitas Air Minum, Sanitasi layak, kuantitas Sarana dan prasarana Bangunan gedung yang tertata	1. Prosentase bangunan gedung yang sesuai dengan standart teknis kontruksi	0%	0%	96%	0%	0%	90%
	2. Persentase rumah tangga berakses air Minum	74%	78%	81%	83,43%	89,08%	91%
	3. Persentase rumah tangga bersanitasi yangaman	80%	72%	84%	80%	72,28%	87,74%
Terwujudnya penyelenggara an penataan ruang yang berkelanjutan	1. Prosentase kesesuaian rencana tata ruang	64%	75%	84%	86%	77%	85%
	2. Prosentase Penata gunaan tanah	0%	0%	50%	0%	0%	70%
Meningkatkan Kualitas dan kuantitas perumahan dan permukiman yang layak	1. Luasan permukiman kumuh di kawasan perumahan dan permukiman yang tertangani	538,27 ha	79,78 ha	202,9 ha	79,78 ha	0 ha	202,9 ha
	2. Persentase rumah layakhuni	55%	56%	91%	55,12%	97%	95%

Sumber Data: LKIP 2022

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Kondisi Yang**  
**Harus Dicapai Pada Tahun 2023 berdasarkan target pada Rencana**  
**Strategis**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET JANGKA MENENGAH PADA RENSTRA 2026	REALISASI Th. 2023	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Kualitas Air Minum, Sanitasi layak, kuantitas Sarana dan prasarana Bangunan gedung yang tertata	1. Prosentase bangunan gedung yang sesuai dengan standart teknis kontruksi	99%	90%	91%
		2. Persentase rumah tangga berakses air Minum	90%	91%	101%
		3. Persentase rumah tangga bersanitasi yang aman	90%	87,74%	97%
2	Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan	1. Prosentase kesesuaian rencanatata ruang	100%	85%	85%
		2. Prosentase Penata gunaan tanah	80%	70%	88%
3	Meningkatkan Kualitas dan kuantitas perumahan dan permukiman yang layak	1. Luasan permukiman kumu hdi kawasan perumahan dan permukiman yang tertangani	100 ha	202,9 ha	98,97%
		2. Persentase rumah layak huni	94%	95%	101%

Sumber Data: Renstra Perubahan 2021-2026

Tabel 3.4  
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI Th. 2023	REALISASI NASIONAL	KET. (+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Kualitas Air Minum, Sanitasi layak, kuantitas Sarana dan prasarana Bangunan gedung yang tertata	1. Prosentase bangunan gedung yang sesuai dengan standart teknis kontruksi	90%	-	
		2. Persentase rumah tangga berakses air Minum	91%	-	
		3. Persentase rumah tangga bersanitasi yang aman	87,74%	-	
2	Terwujudnya penyelenggara an penataan ruang yang berkelanjutan	1. Prosentase kesesuaian rencana tata ruang	85%	-	
		2. Prosentase Penata gunaan tanah	70%	-	
3	Meningkatkan Kualitas dan kuantitas perumahan dan permukiman yang layak	1. Luasan permukiman kumuh di kawasan perumahan dan permukiman yang tertangani	202,9 ha	-	
		2. Persentase rumah layak huni	95%	-	

Sumber Data: Renstra Perubahan 2021-2026

Dari tabel 3.1 s/d 3.4, perbandingan capaian kinerja sasaran tahun 2023 dengan tahun sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Air Minum, Sanitasi layak, kuantitas Sarana dan prasarana Bangunan gedung yang tertata mempunyai 3 indikator kinerja, yaitu :

1. Prosentase bangunan gedung yang sesuai dengan standart teknis kontruksi pada Tahun 2022 indikator tersebut tidak masuk dalam Indikator Perjajian Kinerja Tahun 2022 maupun dalam Renstra DPRKPKK tahun 2021-2026 sehingga target dan capaian tidak dapat direalisasikan. Dengan adanya perubahan Renstra DPRKPKK 2021-2026 indikator Prosentase bangunan gedung yang sesuai dengan standart teknis kontruksi dijadikan Indikator Kinerja pada tahun 2023, sehingga Renstra Perubahan DPRKPKK 2021-2026 dengan Pekerjanjian Kinerja 2023 menjadi selaras. Target yang ditentukan untuk indiktor Prosentase bangunan gedung yang sesuai dengan standart teknis kontruksi Tahun 2023 sebesar 96% dengan realisasi 90% serta capaian 94%.
2. Capaian kinerja pada indikator Persentase rumah tangga berakses air Minum pada tahun 2022 adalah sebesar 114% berdasarkan target sebesar 78% dan realisasi 89%. Sedangkan untuk tahun 2023 Indikator Persentase rumah tangga berakses air Minum mengalami peningkatan dalam target realisasi maupun capaian.
3. Capaian kinerja pada indikator Persentase rumah tangga bersanitasi aman pada tahun 2022 adalah sebesar 100% berdasarkan target sebesar 72% dan realisasi 72,28%. Sedangkan untuk tahun 2023 Indikator Persentase rumah tangga bersanitasi aman mengalami peningkatan dalam target realisasi maupun capaian.

Sasaran 2 : Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan mempunyai 2 indikator kinerja, yaitu :

1. Capaian kinerja pada indikator Prosentase kesesuaian tata ruang pada tahun 2022 adalah sebesar 103% berdasarkan target sebesar 75% dan realisasi 77%. Sedangkan untuk tahun 2023 Indikator Prosentase kesesuaian tata ruang mengalami peningkatan dalam target realisasi maupun capaian.
2. Prosentase penatagunaan tanah pada Tahun 2022 indikator tersebut tidak

masuk dalam Indikator Perjajian Kinerja Tahun 2022 maupun dalam Renstra DPRKPKK tahun 2021-2026 sehingga target dan capaian tidak dapat direalisasikan. Dengan adanya perubahan Renstra DPRKPKK 2021-2016 indikator Prosentase penatagunaan tanah dijadikan Indikator Kinerja pada tahun 2023, sehingga Renstra Perubahan DPRKPKK 2021-2026 dengan Pekerjanjian Kinerja 2023 menjadi selaras. Target yang ditentukan untuk indiktor Prosentase penatagunaan tanah Tahun 2023 sebesar 50% dengan realisasi 70% serta capaian 140%.

Sasaran 3 : Meningkatkan Kualitas dan kuantitas perumahan dan permukiman yang layak mempunyai 2 Indikator Kinerja, yaitu :

1. Capaian kinerja pada indikator Luasan permukiman kumuh di kawasan perumahan dan permukiman yang tertangani pada tahun 2022 adalah sebesar 0% berdasarkan target sebesar 79,78ha dan realisasi 0ha. Sedangkan untuk tahun 2023 Indikator Prosentase kesesuaian tata ruang mengalami peningkatan dalam target realisasi maupun capaian.
2. Capaian kinerja pada indikator Persentase rumah layak huni pada tahun 2022 adalah sebesar 173% berdasarkan target sebesar 56% dan realisasi 97%. Sedangkan untuk tahun 2023 Indikator Prosentase kesesuaian tata ruang mengalami peningkatan dalam target realisasi maupun capaian.

## **B.2 ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN**

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indicator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Table 3.5  
Ikhtisar Capaian Kinerja pada tahun 2023

Sasaran/ Indikator Sasaran	% Capaian	Predikat						
		Sangat Memuaskan	Memuaskan	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
Sasaran 1. Meningkatkan Kualitas Air Minum, Sanitasi layak, kuantitas Sarana dan prasarana Bangunan gedung yang tertata								
Indikator 1.1 Prosentase bangunan gedung yang sesuai dengan standart teknis kontruksi	94%	AA						
Indicator 1.2 Persentase rumah tangga berakses air Minum	113%	AA						
Indicator 1.3 Persentase rumah tangga bersanitasi yang aman	104%	AA						
Rata rata capaian	104%	AA						
Sasaran 2. Terwujudnya penyelenggaraa n penataan ruang yang berkelanjutan								

Indikator 2.1 Prosentase kesesuaian rencana tata ruang	101%	AA						
Indikator 2.2 Prosentase Penata gunaan tanah	140%	AA						
Rata rata capaian	121%	AA						
Sasaran 3. Meningkatkan Kualitas dan kuantitas perumahan dan permukiman yang layak								
Indikator 3.1 Luasan permukiman kumuh di kawasan perumahan dan permukiman yang tertangani	100%	AA						
Indikator 3.2 Persentase rumah layak huni	104%	AA						
Rata rata capaian	102%	AA						

Dari table 3.5 diatas, dapat disimpulkan bahwa dari pengukuran kinerja tahun 2023, secara umum realisasi kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember dalam kategori A (Memuaskan) Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan Kualitas Air Minum, Sanitasi layak, kuantitas Sarana dan prasarana Bangunan gedung yang tertata mempunyai 3 indikator kinerja sebagai berikut :

1. Indikator Prosentase bangunan gedung yang sesuai dengan standart teknis kontruksi yang mempunyai target 96% terealisasi sebesar 90% atau dengan

capaian 94% termasuk dalam kategori Sangat Memuaskan.

2. Indikator Persentase rumah tangga berakses air Minum yang mempunyai target 81% terealisasi sebesar 91% atau dengan capaian 113% termasuk dalam kategori Sangat Memuaskan.
3. Indikator Persentase rumah tangga bersanitasi yang aman yang mempunyai target 84% terealisasi sebesar 84,74% atau dengan capaian 104% termasuk dalam kategori Sangat Memuaskan.

Terlihat bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap Sasaran Meningkatkan Kualitas Air Minum, Sanitasi layak, kuantitas Sarana dan prasarana Bangunan gedung yang tertata dengan 3 Indikator Kinerja Sasaran menunjukkan Predikat **Sangat Memuaskan** yaitu mempunyai Capaian nilai rata-rata 104% dengan 3 Indikator yang mencapai target sesuai yang ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Beberapa hal yang menjadi pemasalahan dan perlu diperbaiki untuk rencana kedepan adalah :

1. Masyarakat yang kurang teredukasi tentang penggunaan aplikasi SIMBG dalam pengajuan PBG dan SLF.
2. Kurangnya Monitoring ataupun pengawasan terhadap kesesuaian izin pendirian bangunan.
3. Pelayanan air minum non perpipaan sebagian besar diperdesaan belum teridentifikasi secara kuantitatif maupun kualitatif berdasarkan kondisi air yang dikonsumsi secara mandiri.
4. Berkurangnya debit air dikarenakan banyaknya pembangunan perumahan.
5. Terbatasnya sumber air baku di beberapa daerah.
6. Pengolahan lumpur tinja belum efektif karena masih rendahnya pemanfaatan sarana IPLT yang sudah terbangun.
7. Masih terdapat dan kurang teredukasinya masyarakat yang mempunyai hebit BABS (Buang Air Besar Sembarangan).
8. Belum memadainya pelayanan sanitasi yang hal itu akan dapat memberikan kontribusi pencemaran terhadap air permukaan dan air tanah.

Solusi perbaikan terhadap pemasalahan ini Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya akan :

1. Mengadakan Sosialisasi kepada masyarakat melalui Kecamatan sebagai kepanjangan tangan dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan

- Cipta Karya untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas SDM Pengelola Pelayanan Air Minum dan peran serta seluruh Stake holder dalam upaya mencapai sasaran pembanguna air minum dipekotaan dan diperdesaan.
  3. Mendorong terbentuknya regionalisasi pengelolaan air minum sebagai upaya meningkatkan efisiensi pelayanan dan efisiensi pemanfaatan sumber air baku.
  4. Meningkatkan kualitas IPLT sebagai pengelolaan air limbah.
  5. Menciptakan iklim yang kondusif untuk berperan serta dalam meningkatkan pelayanan air limbah yang layak untuk masyarakat.
  6. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak dari BABS (Buang Air Besar Sembarangan).

Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan mempunyai 2 indikator kinerja sebagai berikut :

1. Indikator Prosentase kesesuaian rencana tata ruang mempunyai target 84% terealisasi sebesar 85% atau dengan capaian 101% termasuk dalam kategori Sangat Memuaskan.
2. Indikator Prosentase Penata gunaan tanah mempunyai target 50% teralisasi sebesar 70% atau dengan capaian 140% termasuk dalam kategori Sangat Memuaskan.

Terlihat bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap Sasaran Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan dengan 2 Indikator Kinerja Sasaran menunjukkan Predikat **Sangat Memuaskan** yaitu mempunyai Capaian nilai rata-rata 120% dengan 2 Indikator yang mencapai target sesuai yang ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Beberapa hal yang menjadi pemasalahan dan perlu diperbaiki untuk rencana kedepan adalah :

1. Belum ditetapkannya Perda RTRW Kabupaten Jember sebagai dokumen integrasi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
2. Kurangnya pemanfaatan masyarakat terhadap pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang wilyah.

Solusi perbaikan terhadap pemasalah ini Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya akan :

1. Percepatan Penetapan Perda RTRW Kabupaten Jember.
2. Sosialisasi kepada masyarakat tentang pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang melalui konsultasi publik.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan Kualitas dan kuantitas perumahan dan permukiman yang layak mempunyai 2 indikator kinerja sebagai berikut :

1. Indikator Luasan permukiman kumuh di kawasan perumahan dan permukiman yang tertangani mempunyai target 202,9ha terealisasi sebesar 202,9ha atau dengan capaian 100% termasuk dalam kategori Sangat Memuaskan.
2. Indikator Persentase rumah layak huni mempunyai target 91% terealisasi sebesar 95% atau dengan capaian 104% termasuk dalam kategori Sangat Memuaskan.

Terlihat bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap Sasaran Meningkatkan Kualitas dan kuantitas perumahan dan permukiman yang layak dengan 2 Indikator Kinerja Sasaran menunjukkan Predikat **Sangat Memuaskan** yaitu mempunyai Capaian nilai rata-rata 102% dengan 2 Indikator yang mencapai target sesuai yang ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Beberapa hal yang menjadi permasalahan dan perlu diperbaiki untuk rencana kedepan adalah :

1. Terbatasnya akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam memenuhi kebutuhan rumah layak huni.
2. Belum memadainya prasarana dan sarana dasar lingkungan perumahan dan permukiman sehingga menurunnya kualitas lingkungan permukiman dan meningkatnya luasan kawasan kumuh.
3. Terbatasnya penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman di desa tertinggal di Kabupaten Jember.

Solusi perbaikan terhadap pemasalah ini Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya akan :

1. Peningkatan pemenuhan rumah layak huni bagi seluruh masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
2. Upaya penataan lingkungan dan pemenuhan sarana dan prasarana di kawasan permukiman sehingga kualitas lingkungan permukiman meningkat dan luasan kawasan kumuh berkurang.

3. Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman di desa tertinggal di Kabupaten Jember.

### **B.3 ANALISA PROGRAM – KEGIATAN- SUB KEGIATAN YANG Mendukung Sasaran**

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember pada tahun 2023 didukung (9) Program (13) Kegiatan dan (21) Sub Kegiatan, dengan uraian capaian sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.6**  
**Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Pendukung**  
**Sasaran** Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan  
 Cipta Karya Kabupaten Jember **tahun 2023**

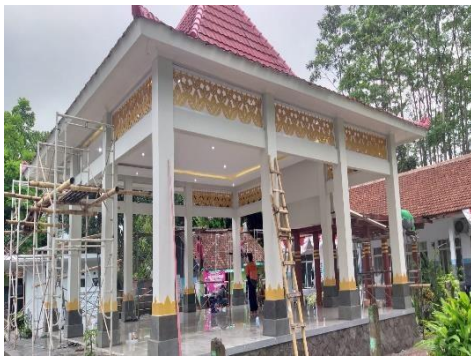
Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan Kualitas Air Minum, Sanitasi layak, kuantitas Sarana dan prasarana Bangunan gedung yang tertata

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1.	Program : PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rp 15.123.990.350	Rp 14.488.391.053	96%
	Kegiatan : Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten/kota, pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung	Rp 15.123.990.350	Rp 14.488.391.053	96%

Sub Kegiatan : 1. Penyelenggaraan penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB), Sertifikat laik fungsi (SLF), Peran tenaga ahli bangunan gedung (TABG), Pendataan bangunan gedung, serta implementasi SIMBG	Rp 1.548.777.185	Rp 1.429.620.253	92%
Input : Jumlah Dana/ Anggaran	Rp 15.123.990.350	Rp 1.429.620.253	92%
Output : Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	1000 Dokumen	1000 Dokumen	100%
Outcome : Peningkatan Jumlah bangunan gedung yang memiliki PBG dan SLF dan yang sesuai dengan standar teknis konstruksi	1000 Dokumen	1000 Dokumen	100%
Sub Kegiatan : 2. Perencanaan, pembangunan, pengawasan, dan pemanfaatan bangunan gedung daerah kabupaten/kota	Rp 458.516.800	Rp 437.876.800	95%
Input : Jumlah Dana/ Anggaran	Rp 458.516.800	Rp 437.876.800	95%
Output : Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan,	25 Dokumen	25 Dokumen	100%

	Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota			
	Outcome : Peningkatan jumlah pemanfaatan bangunan gedung daerah kabupaten/kota yang sesuai dengan perencanaan, pembangunan dan pengawasan	25 Dokumen	25 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan : 3. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Rp 776.978.485	Rp 762.850.500	98%
	Input : Jumlah Dana/ Anggaran	Rp 776.978.485	Rp 762.850.500	98%
	Output: Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Outcome : Peningkatan penyelenggaraan bangunan gedung negara kabupaten/kota yang di monitoring dan evaluasi			
	Sub Kegiatan : 4. Pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung daerah kabupaten/kota	Rp 12.339.717.880	Rp 11.858.043.500	96%
	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp 12.339.717.880	Rp 14.488.391.053	96%
	Output : Jumlah Bangunan	25 Unit	25 Unit	100%

Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan			
Outcome : Peningkatan jumlah bangunan gedung negara yang terpelihara	25 Unit	25 Unit	100%



*Rehab Gedung Kelurahan Slawu*



*Rehab Gedung Kelurahan Summersari*

2.	Program : PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Rp 8.299.438.717	Rp 7.906.093.775	95%
	Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Rp 8.299.438.717	Rp 7.906.093.775	95%
	Sub Kegiatan : 1. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Rp 51.800.000	Rp 47.420.000	92%
	Input : Jumlah Dana/ Anggaran	Rp 51.800.000	Rp 47.420.000	92%
	Output : Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun	2 Liter/Detik	2 Liter/Detik	100%

	Outcome : Meningkatnya Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun	2 Liter/Detik	2 Liter/Detik	100%
	Sub Kegiatan : 2. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan dikawasan perdesaaan	Rp 194.464.526	Rp 162.492.717	84%
	Input : Jumlah Dana/ Anggaran	Rp 194.464.526	Rp 162.492.717	84%
	Output : Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	250 SR	250 SR	100%
	Outcome : Meningkatnya Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	250 SR	250 SR	100%
	Sub Kegiatan : 3. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Rp 609.918.960	Rp 578.959.286	95%
	Input : Jumlah Dana/ Anggaran	Rp 609.918.960	Rp 578.959.286	95%
	Output: Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM	50 SR	50 SR	100%

	Tematik Tertentu			
	Outcome : Meningkatnya Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	50 SR	50 SR	100%
	Sub Kegiatan : 4. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Rp 87.788.400	Rp 72.937.093	83%
	Input : Jumlah Dana/ Anggaran	Rp 87.788.400	Rp 72.937.093	83%
	Output: Jumlah Kelompok Masyarakat yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi	15 Kelompok Masyarakat	15 Kelompok Masyarakat	100%
	Outcome : Meningkatnya Jumlah Kelompok Masyarakat yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi	15 Kelompok Masyarakat	15 Kelompok Masyarakat	100%
	Sub Kegiatan : 5. Perluasan SPAM jaringan perpipaan di Kawasan Perdesaaan	Rp 7.355.466.831	Rp 7.044.284.679	96%
	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp 7.355.466.831	Rp 7.044.284.679	96%

	Output : Jumlah jaringan Sistem Penyediaan Air Minum yang diperluas dikawasan Perdesaan	15 Lokasi	15 Lokasi	100%
	Outcome : Meningkatnya Jumlah jaringan Sistem Penyediaan Air Minum yang diperluas dikawasan Perdesaan	15 Lokasi	15 Lokasi	100%



*Lokasi Kec. Sukowono*



*Lokasi Sumberjari, Kec. Silo*

3.	Program : PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Rp 18.026.349.732	Rp 16.184.577.545	90%
	Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota	Rp 18.026.349.732	Rp 16.184.577.545	90%
	Sub Kegiatan : 1. Pembangunan atau penyediaan sub sistem pengolahan setempat	Rp 15.919.580.476	Rp 14.612.968.389	92%
	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp 15.919.580.476	Rp 14.612.968.389	92%

Output : Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	1950 Rumah Tangga	1950 Rumah Tangga	100%
Outcome : Meningkatnya Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	1950 Rumah Tangga	1950 Rumah Tangga	100%
Sub Kegiatan : 2. Pembangunan /penyediaan sarana dan prasarana IPLT	Rp 2.106.769.256	Rp 1.571.609.156	75%
Input : Dana yang dibutuhkan	Rp 2.106.769.256	Rp 1.571.609.156	75%
Output : Kapasitas IPLT Terbangun	5 M <sup>3</sup> /Hari	5 M <sup>3</sup> /Hari	100%
Outcome : Meningkatnya Kapasitas IPLT Terbangun	5 M <sup>3</sup> /Hari	5 M <sup>3</sup> /Hari	100%



*Pembangunan MCK Desa Klungkung, Kecamatan Sukorambi*



*Pembangunan Jamban Desa tegalgede, Kecamatan Summersari*

Sasaran Strategis 2: Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1.	Program : PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Rp 1.070.903.228	Rp 795.533.382	74%
	Kegiatan : Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Rp 484.899.000	Rp 348.800.812	72%
	Sub Kegiatan : 1. Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Rp 484.899.000	Rp 348.800.812	72%
	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp 484.899.000	Rp 348.800.812	72%
	Output : Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Outcome : Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Rp 344.612.942	Rp 298.716.345	87%
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Rp 344.612.942	Rp 298.716.345	87%

	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp 344.612.942	Rp 298.716.345	87%
	Output : Jumlah dokumen pemanfaatan ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Outcome : Jumlah dokumen pemanfaatan ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Rp 241.391.286	Rp 148.016.225	61%
	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Rp 241.391.286	Rp 148.016.225	61%
	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp 241.391.286	Rp 148.016.225	61%
	Output : 1. Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	200 Dokumen	200 Dokumen	100%
	Output : 2. Terlaksananya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	6 Rapat	6 Rapat	100%
	Outcome : Terlaksananya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	6 Rapat	6 Rapat	100%
	Output : Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Outcome : Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kab/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100%



*Konsultasi RTRW dengan Kementerian*

2.	Program : PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Rp 369.096.842	Rp 238.745.397	65%
	Kegiatan : Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Rp 369.096.842	Rp 238.745.397	65%
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Rp 369.096.842	Rp 238.745.397	65%
	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp 369.096.842	Rp 238.745.397	65%
	Output : Jumlah sengketa tanah yang tertangani	50%	70%	140%
	Outcome: Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Kali	12 Kali	100%



*Rapat Koordinasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan di Kab. Jember*

Sasaran Strategis 3: Meningkatkan Kualitas dan kuantitas perumahan dan permukiman yang layak

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1.	Program : PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rp 3.479.812.650	Rp 3.414.331.728	98%
	Kegiatan : Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Rp 206.243.100	Rp 186.969.221	91%
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terinteghrasi Secara Elektronik	Rp 206.243.100	Rp 186.969.221	91%
	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp 206.243.100	Rp 186.969.221	91%
	Output : Jumlah kawasan perumahan yang dikembangkan terintegritasi secara elektronik	20 KWS	20 KWS	100%
	Outcome : Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan	20 KWS	20 KWS	100%

	Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik			
	Kegiatan : Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) ha	Rp 185.740.300	Rp 156.832.227	84%
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Rp 185.740.300	Rp 156.832.227	84%
	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp 185.740.300	Rp 156.832.227	84%
	Output : Jumlah Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	10 Kawasan	10 KWS	100%
	Outcome : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	10 Kawasan	10 KWS	100%
	Kegiatan : Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Rp 3.087.829.250	Rp 3.070.530.280	99%
	Sub Kegiatan : Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Rp 3.087.829.250	Rp 3.070.530.280	99%

	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp 3.087.829.250	Rp 3.070.530.280	99%
	Output : Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	86 Unit	86 Unit	100%
	Outcome : Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	86 Unit	86 Unit	100%

### DOKUMENTASI RTLH TAHUN 2023

Sebelum



Sesudah



*Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni*

2.	Program : PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Rp 23.817.515.549	Rp 19.540.012.684	82%
	Kegiatan : Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Rp 23.817.515.549	Rp 19.540.012.684	82%

	Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Rp 23.817.515.549	Rp 19.540.012.684	82%
	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp 23.817.515.549	Rp 19.540.012.684	82%
	Output : Jumlah sarana dan prasarana utilitas umum yang terbangun	31 Lokasi	31 Lokasi	100%
	Outcome : Jumlah sarana dan prasarana utilitas umum yang terbangun	31 Lokasi	31 Lokasi	100%



*Pembangunan PJU di Desa Klungkung, Kecamatan Sukorambi*

3.	Program : PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rp 184.385.000	Rp 157.500.000	85%
	Kegiatan : Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rp 184.385.000	Rp 157.500.000	85%

Sub Kegiatan : Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Rp 184.385.000	Rp 157.500.000	85%
Input : Dana yang dibutuhkan	Rp 184.385.000	Rp 157.500.000	85%
Output : Jumlah data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana/ relokasi program Kabupaten	5 Unit	5 Unit	100%
Outcome : Jumlah data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana/ relokasi program Kabupaten	5 Unit	5 Unit	100%

Sebelum



Sesudah



*Pembangunan Rumah Korban Bencana di Jl.Gajah Mada 14 No.309, Kelurahan Kaliwates*

4.	Program : PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rp 29.895.016.680	Rp 29.358.134.500	98%
	Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rp 29.895.016.680	Rp 29.358.134.500	98%
	Sub Kegiatan : Pembangunan Jalan	Rp 29.895.016.680	Rp 29.358.134.500	98%
	Input : Dana yang dibutuhkan	Rp 29.895.016.680	Rp 29.358.134.500	98%

Output : Panjang Jalan yang Dibangun	12 KM	12 KM	100%
Outcome : Panjang Jalan yang Dibangun	12 KM	12 KM	100%



*Pembangunan Jalan Lingkungan  
Kelurahan Sempusari, Kaliwates*



*Pembangunan Jalan Lingkungan  
Kelurahan Kebonagung, Kaliwates*

#### **B.4 ANALISA ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA**

Sumber Daya adalah nilai potensi yang dimiliki dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Sumber daya yang dimiliki Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2023 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi

**Tabel 3.7**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

<b>Sasaran</b>	<b>% Capaian Kinerja</b>	<b>% Serapan Anggaran</b>	<b>Tingkat Efisiensi</b>
Meningkatkan Kualitas Air Minum, Sanitasi layak, kuantitas Sarana dan prasarana Bangunan gedung yang tertata	104%	93%	Efisien
Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan	121%	72%	Efisien
Meningkatkan Kualitas dan kuantitas perumahan dan permukiman yang layak	102%	91%	Efisien

Sumberdaya Manusia Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember berjumlah 86 orang ASN dengan rincian 8 pejabat Struktural, 8 Pejabat Fungsional dan 70 Pelaksana.

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan pemerintah di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta urusan pemerintahan di bidang pertanahan didukung anggaran sebesar **Rp. 161.980.893.602,-** dan terserap sebesar **Rp. 151.648.086.860,-**

Sumberdaya diatas mendukung tercapainya kinerja sasaran strategis dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember.

Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Air Minum, Sanitasi layak, kuantitas Sarana dan prasarana Bangunan gedung yang tertata dengan rata- rata capaian **104%** efisien dalam penggunaan anggaran

Sasaran 2 : Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan dengan rata- rata capaian **121%** efisien dalam penggunaan

anggaran

Sasaran 3 : Meningkatkan Kualitas dan kuantitas perumahan dan permukiman yang layak dengan rata- rata capaian **102%** efisien dalam penggunaan anggaran.

Pada tahun 2023, karena kebijakan anggaran Pemerintah Kabupaten , terdapat Perubahan atau Pergeseran Anggaran pada P-APBD 2023 di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember sebesar **Rp 62.830.038.170,-** , antara lain Perubahan atau Pergeseran Anggaran pada :

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Anggaran awal Sebesar Rp 682.036.890,- berkurang Sebesar Rp 295.635.060,-
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Anggaran awala Sebesar Rp 9.743.318.091,- bertambah Sebesar Rp 357.686.041,-
- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Anggaran awal Sebesar Rp 17.955.500,- berkurang Sebesar Rp 9.260.000,-
- d. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, Anggaran awal Sebesar Rp 172.481.250,- berkurang Sebesar Rp 50.329.000,-
- e. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, Anggaran awal Sebesar Rp 99.387.730,- berkurang Sebesar Rp 12.424.790,-
- f. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Anggaran awal Sebesar Rp 837.367.525,- berkurang Sebesar Rp 177.038.798,-
- g. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Anggaran awal Sebesar Rp 595.317.420,- bertambah Sebesar Rp 66.627.800,-
- h. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Anggaran awal Sebesar Rp 333.840.000,- bertambah Sebesar Rp 62.261.533,-
- i. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Anggaran awal Rp 31.802.251.766,- bertambah Sebesar Rp 10.523.424.464,-

- j. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Anggaran awal Sebesar Rp 3.149.029.516,- bertambah sebesar Rp 416.257.000,-
- k. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Anggaran awal Sebesar Rp 2.393.578.535,- berkurang Sebesar Rp 249.255.000,-
- l. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Anggaran awal Sebesar Rp 417.752.496,- bertambah sebesar Rp 366.940.792,-
- m. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Anggaran awal Sebesar Rp 150.174.810,- berkurang Sebesar Rp 50.001.422,-
- n. Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan, Anggaran Awal Rp 249.785.700,- berkurang Sebesar Rp 197.985.700,-
- o. Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, Anggaran awal Sebesar Rp 1.130.041.201,- berkurang Sebesar Rp 935.576.675,-
- p. Sub Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan, Anggaran awal Sebesar Rp 809.918.960,- berkurang Sebesar Rp 200.000.000,-
- q. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat, Anggaran awal Sebesar Rp 191.828.400,- berkurang Sebesar Rp 104.040.000,-
- r. Sub Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, Anggaran awal Sebesar Rp 7.079.635.536,- bertambah Sebesar Rp 275.831.295,-
- s. Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat, Anggaran awal Sebesar Rp 12.649.820.000,- bertambah Sebesar Rp 3.269.760.476,-
- t. Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT, Anggaran awal Rp 2.770.951.656,- berkurang Sebesar Rp 664.182.400,-
- u. Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan, Anggaran awal Sebesar Rp 47.696.948,- berkurang Sebesar Rp 47.696.948,-

- v. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG, Anggaran awal Sebesar Rp 784.346.110,- bertambah Sebesar Rp 764.431.075,-
- w. Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota, Anggaran awal Sebesar Rp 666.000.000,- berkurang Sebesar Rp 207.483.200,-
- x. Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota, Anggaran awal Sebesar Rp 370.874.160,- bertambah Sebesar Rp 406.104.325,-
- y. Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota, Anggaran awal Sebesar Rp 12.280.892.080,- bertambah Sebesar Rp 58.825.800,-
- z. Sub Kegiatan Pembangunan Jalan, Anggaran awal Sebesar Rp 27.081.616.680,- berkurang Sebesar Rp 35.512.561.805,-
- aa. Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota, Anggaran awal Sebesar Rp 275.000.000,- bertambah Sebesar Rp 209.899.000,-
- bb. Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota, Anggaran awal Sebesar Rp 465.122.000,- berkurang Sebesar 465.122.000,-
- cc. Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Bidang Penataan Ruang, Anggaran Awal Rp 268.620,- berkurang Sebesar 268.620,-
- dd. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah, Anggaran awal Sebesar Rp 66.810.000,- bertambah Sebesar Rp 177.802.942,-
- ee. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang, Anggaran awal Sebesar Rp 266.119.636,- berkurang Sebesar Rp 24.728.350,-
- ff. Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana, Anggaran awal Sebesar Rp 355.735.000,- berkurang Sebesar Rp 171.350.000,-
- gg. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin

Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik, Anggaran awal Sebesar Rp 254.236.250,- berkurang Sebesar Rp 47.993.150,-

hh. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh, Anggaran awal Sebesar Rp 147.344.500,- bertambah Sebesar Rp 38.395.800,-

ii. Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, Anggaran awal Sebesar Rp 4.130.771.900,- berkurang Sebesar Rp 1.042.942.650,-

jj. Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Anggaran awal Sebesar Rp 61.968.343.592,- berkurang Sebesar Rp 38.150.828.043,-

kk. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah, Anggaran awal Sebesar Rp 1.576.679.744,- berkurang Sebesar Rp 1.207.582.902,-

### **C. REALISASI ANGGARAN**

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember, pada tahun anggaran 2023

didukung dengan anggaran sebesar Rp 161.980.893.602,- Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Jember.

Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja Modal dengan perincian sebagai berikut :

- Belanja Operasional sebesar Rp 133.890.498.450,-
- Belanja Modal sebesar Rp 28.090.395.152,-

Anggaran belanja tersebut dialokasikan untuk mendanai (10) program dan (19) kegiatan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra dengan realisasi per program sebagai berikut :

**Tabel 3.8**  
**REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM TAHUN 2023**

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>PAGU</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
	<b>Program : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>61.714.384.854</b>	<b>59.564.766.796</b>	<b>97%</b>
1	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	386.401.830	343.010.702	89%
	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	386.401.830	343.010.702	89%
2	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.231.851.882	9.210.233.692	90%
	Sub Kegiatan 1 : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.101.004.132	9.083.018.898	90%
	Sub Kegiatan 2 : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.695.500	8.211.596	94%
	Sub Kegiatan 3 : Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	122.152.250	119.003.198	97%
3	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	86.962.940	78.881.080	91%
	Sub Kegiatan : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	86.962.940	78.881.080	91%
4	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.805.437.553	1.513.880.849	84%
	Sub Kegiatan 1 : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	31.489.923	31.279.561	99%
	Sub Kegiatan 2 : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	660.328.727	516.593.208	78%
	Sub Kegiatan 3 : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	661.945.220	581.069.804	88%
	Sub Kegiatan 4 : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	55.572.150	49.907.407	90%
	Sub Kegiatan 5 : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	396.101.533	335.030.869	85%
5	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	46.086.788.310	45.686.253.180	99%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
	Daerah			
	Sub Kegiatan 1 : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.325.475	452.000	6%
	Sub Kegiatan 2 : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	42.325.676.230	42.276.662.221	100%
	Sub Kegiatan 3 : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	188.500.089	142.072.783	75%
	Sub Kegiatan 4 : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.565.286.516	3.267.066.176	92%
6	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.116.942.339	2.732.507.293	88%
	Sub Kegiatan 1 : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	87.752.128	74.420.740	85%
	Sub Kegiatan 2 : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.144.323.535	2.017.406.870	94%
	Sub Kegiatan 3 : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	784.693.288	556.461.714	71%
	Sub Kegiatan 4 : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.173.388	84.217.969	84%
	<b>Program : PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>8.299.438.717</b>	<b>7.906.093.775</b>	<b>95%</b>
1	Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	8.299.438.717	7.906.093.775	95%
	Sub Kegiatan 1 : Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	51.800.000	47.420.000	92%
	Sub Kegiatan 2 : Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di	194.464.526	162.492.717	84%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
	Kawasan Perdesaan			
	Sub Kegiatan 3 : Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	609.918.960	578.959.286	95%
	Sub Kegiatan 4 : Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	87.788.400	72.937.093	83%
	Sub Kegiatan 5 : Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	7.355.466.831	7.044.284.679	96%
	<b>Program : PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	18.026.349.732	16.184.577.545	<b>90%</b>
1	Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	18.026.349.732	16.184.577.545	90%
	Sub Kegiatan 1 : Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	15.919.580.476	14.612.968.389	92%
	Sub Kegiatan 2 : Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	2.106.769.256	1.571.609.156	75%
	<b>Program : PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>1.548.777.185</b>	<b>1.429.620.253</b>	<b>92%</b>
1	Kegiatan : Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	15.123.990.350	14.488.391.053	96%
	Sub Kegiatan 1 : Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	1.548.777.185	1.429.620.253	92%
	Sub Kegiatan 2 : Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah	458.516.800	437.876.800	95%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
	Kabupaten/Kota			
	Sub Kegiatan 3 : Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	776.978.485	762.850.500	98%
	Sub Kegiatan 4 : Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	12.339.717.880	11.858.043.500	96%
	<b>Program : PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>29.895.016.680</b>	<b>29358134500</b>	<b>98%</b>
1	Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	29.895.016.680	29358134500	98%
	Sub Kegiatan : Pembangunan Jalan	29.895.016.680	29358134500	98%
	<b>Program : PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>1.070.903.228</b>	<b>795.553.382</b>	<b>74%</b>
1	Kegiatan : Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	484.899.000	348.800.812	72%
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	484.899.000	348.800.812	72%
2	Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	344.612.942	29.8716.345	87%
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	344.612.942	29.8716.345	87%
3	Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	241.391.286	148.016.225	61%
	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	241.391.286	148.016.225	61%
	<b>Program : PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>184.385.000</b>	<b>157.500.000</b>	<b>85%</b>
1	Kegiatan : Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	184.385.000	157.500.000	85%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
	Sub Kegiatan : Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	184.385.000	157.500.000	85%
	<b>Program : PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>3.379.812.650</b>	<b>3.414.331.728</b>	<b>98%</b>
1	Kegiatan : Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	206.243.100	186.969.221	91%
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	206.243.100	186.969.221	91%
2	Kegiatan : Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	185.740.300	156.832.227	84%
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	185.740.300	156.832.227	84%
3	Kegiatan : Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	3.087.829.250	3.070.530.280	99%
	Sub Kegiatan : Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	3.087.829.250	3.070.530.280	99%
	<b>Program : PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	<b>23.817.515.549</b>	<b>19.540.012.684</b>	<b>82%</b>
1	Kegiatan : Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	23.817.515.549	19.540.012.684	82%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	23.817.515.549	19.540.012.684	82%
	<b>Program : PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>	<b>369.096.842</b>	<b>238.745.397</b>	<b>65%</b>
1	Kegiatan : Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	369.096.842	238.745.397	65%
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	369.096.842	238.745.397	65%

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>PAGU</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>161.980.893.602</b>	<b>151.648.086.860</b>	<b>94%</b>

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi anggaran Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember pada tahun 2023 sebesar Rp. 151.648.086.860,00 dari total anggaran Rp. 161.980.893.602,00 atau 94%. Jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran pada tahun 2022 maka mengalami penurunan sebesar 4% yaitu pada tahun 2022 dari total anggaran sebesar Rp. 226.965.573.003,00 terealisasi sebesar Rp. 222.085.164.430,00,- atau 98%. Penurunan ini disebabkan karena adanya pergeseran anggaran sehingga anggaran yang dikelola pada tahun 2023 lebih kecil daripada anggaran Tahun 2022, hal ini mempengaruhi pada capaian serapan anggaran pada Tahun 2023.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN UMUM PENCAPAIAN KINERJA**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang menjadi tugas dan wewenang Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember. Didalamnya diinformasikan tentang sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember pada tahun 2023 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember 2021-2026. Disamping itu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan sarana sebagai bahan evaluasi dan umpan balik dalam menunjang perbaikan kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember pada tahun-tahun mendatang.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) dikategorikan Baik karena dari (7) indikator sasaran sebanyak 5 indikator pencapaiannya dalam kategori sangat memuaskan dan 2 indikator dalam kategori sangat kurang.

Realisasi Penyerapan Anggaran tahun 2023 sebesar Rp 151.648.086.860,- (94%), sedangkan hasil evaluasi efisiensi menunjukkan ada efisiensi dari perbandingan antara capaian kinerja dan capaian penyerapan anggaran.

## **B. PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI PERBAIKAN**

Terkait dengan hal tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember masih menghadapi kendala atau hambatan yang berpengaruh terhadap optimalisasi pencapaian target yang ditetapkan. dengan hambatan dan permasalahan sebagai berikut :

1. Hambatan dan Permasalahan pada Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Air Minum, Sanitasi layak, kuantitas Sarana dan prasarana Bangunan gedung yang tertata yaitu :

- 1) Masyarakat yang kurang teredukasi tentang penggunaan aplikasi SIMBG dalam pengajuan PBG dan SLF.
- 2) Kurangnya Monitoring ataupun pengawasan terhadap kesesuaian izin pendirian bangunan.
- 3) Pelayanan air minum non perpipaan sebagian besar diperdesaan belum teridentifikasi secara kuantitatif maupun kualitatif berdasarkan kondisi air yang dikonsumsi secara mandiri.
- 4) Berkurangnya debit air dikarenakan banyaknya pembangunan perumahan.
- 5) Terbatasnya sumber air baku di beberapa daerah.
- 6) Pengolahan lumpur tinja belum efektif karena masih rendahnya pemanfaatan sarana IPLT yang sudah terbangun.
- 7) Masih terdapat dan kurang teredukasinya masyarakat yang mempunyai hebit BABS (Buang Air Besar Sembarangan).
- 8) Belum memadainya pelayanan sanitasi yang hal itu akan dapat memberikan kontribusi pencemaran terhadap air permukaan dan air tanah.

2. Hambatan dan Permasalahan pada Sasaran Strategis Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan, yaitu :

- 1) Belum ditetapkannya Perda RTRW Kabupaten Jember sebagai dokumen integrasi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
- 2) Kurangnya pemanfaatan masyarakat terhadap pemanfaatan

ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

3. Hambatan dan Permasalahan pada Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas dan kuantitas perumahan dan permukiman yang layak, yaitu :

- 1) Terbatasnya akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam memenuhi kebutuhan rumah layak huni.
- 2) Belum memadainya prasarana dan sarana dasar lingkungan perumahan dan permukiman sehingga menurunnya kualitas lingkungan permukiman dan meningkatnya luasan kawasan kumuh.
- 3) Terbatasnya penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman di desa tertinggal di Kabupaten Jember.

Oleh karenanya direkomendasikan perbaikan untuk meminimalkan kendala pencapaian sasaran pada tahun 2023 dan tahun – tahun berikutnya antara lain :

1. Solusi Perbaikan untuk permasalahan pada Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Air Minum, Sanitasi layak, kuantitas Sarana dan prasarana Bangunan gedung yang tertata, yaitu :

- 1) Mengadakan Sosialisasi kepada masyarakat melalui Kecamatan sebagai kepanjangan tangan dari Dinas Peumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat.
- 2) Meningkatkan kualitas SDM Pengelola Pelayanan Air Minum dan peran serta seluruh Stake holder dalam upaya mencapai sasaran pembanguna air minum dipekotaan dan diperdesaan.
- 3) Mendorong terbentuknya regionalisasi pengelolaan air minum sebagai upaya meningkatkan efisiensi pelayanan dan efisiensi pemanfaatan sumber air baku.
- 4) Meningkatkan kualitas IPLT sebagai pengelolaan air limbah.
- 5) Menciptakan iklim yang kondusif untuk berperan serta dalam meningkatkan pelayanan air limbah yang layak untuk masyarakat.
- 6) Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak dari BABS (Buang Air Besar Sembarangan).

2. Solusi Perbaikan untuk permasalahan pada Sasaran Strategis Terwujudnya

penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan, yaitu :

- 1) Percepatan Penetapan Perda RTRW Kabupaten Jember.
  - 2) Sosialisasi kepada masyarakat tentang pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang melalui konsultasi publik.
3. Solusi Perbaikan untuk permasalahan pada Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas dan kuantitas perumahan dan permukiman yang layak, yaitu :
- 1) Peningkatan pemenuhan rumah layak huni bagi seluruh masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
  - 2) Upaya penataan lingkungan dan pemenuhan sarana dan prasarana dikawasan permukiman sehingga kualitas lingkungan permukiman meningkat dan luasan kawasan kumh berkurang.
  - 3) Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman di desa tertinggal di Kabupaten Jember.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2022 sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2023.

Jember, Februari 2024  
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,  
KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA  
KABUPATEN JEMBER



**RAHMAN ANDA / ST, MT, M.Si**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19770524 200212 1 008

@5 A D = F 5 B

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA KABUPATEN JEMBER

224.810.931.772

-3.164.887.000

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		AKHIR RPJMD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			15	16
<b>TOTAL ANGGARAN</b>								0	0	221.646.044.772	175.694.285.417	176.756.409.417	177.686.628.417	751.783.368.023											
<b>1. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni dan Berkelanjutan sesuai dengan Rencana Tata Ruang untuk Pemenuhan Pelayanan Publik</b>																									
<b>1. Persentase Capaian Pelayanan Infrastruktur Dasar</b>																									
<b>1. Meningkatkan Kualitas Air Minum, Sanitasi Layak, Kuantitas Sarana dan Prasarana Bangunan Gedung yang Tertata</b>																									
<b>1.1 Persentase Bangunan Gedung yang sesuai dengan Standar Teknis</b>																									
<b>RPJMD 2021-2026</b>	1 03 08		<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	Bangunan berIMB per satuan bangunan	1.000 Unit	Unit					1.000 Unit	15.752.112.350	1.000 Unit	15.000.000.000	1.000 Unit	15.000.000.000	1.000 Unit	15.000.000.000	7.000 Unit	60.752.112.350	DPRKCK				
	1 03 08 2.01		Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten/kota, pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung	Jumlah gedung negara terbangun dan yang ter rehabilitasi	31 gedung	gedung	0	gedung	0	26 gedung	15.752.112.350	10 gedung	19.500.000.000	10 gedung	19.500.000.000	10 gedung	19.500.000.000	56 gedung	86.941.211.790						
	1 03 08 2.01 01		Penyelenggaraan penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB), Sertifikat laik fungsi (SLF), Peran tenaga ahli bangunan gedung (TABG), Pendataan bangunan gedung, serta implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	18.133 Dok	dok		dok		1.000 dok	784.346.110	1.000 dok	15.000.000.000	1.000 dok	15.000.000.000	1.000 dok	15.000.000.000	1.000 dok	45.784.346.110						
	1 03 08 2.01 02		Perencanaan, pembangunan, pengawasan, dan pemanfaatan bangunan gedung daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	31	dok		dok		26 dok	666.000.000	10 dok	2.000.000.000	10 dok	2.000.000.000	10 dok	2.000.000.000	87 dok	21.225.973.600						
	1 03 08 2.01 05		Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota		Dok		Dok		1 dok	370.874.160	1 dok	500.000.000	1 dok	500.000.000	1 dok	500.000.000	4 dok							
	1 03 08 2.01 13		Pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung daerah kabupaten/kota	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/ Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan	31	Unit		Unit		26 Unit	13.930.892.080	10 Unit	2.000.000.000	10 Unit	2.000.000.000	10 Unit	2.000.000.000	87 Unit	19.930.892.080						
<b>RPJMD 2021-2026</b>	1 03 11		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONTRUKSI</b>				0		0	0	0			20.000.000		20.000.000		20.000.000		60.000.000	DPRKCK				
				Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi	0 Pelatihan	Pelatihan		Pelatihan		10 Pelatihan	10.000.000	10 Pelatihan	10.000.000	10 Pelatihan	10.000.000	10 Pelatihan	10.000.000	30 Pelatihan	30.000.000						
				Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah	0 Sistem	Sistem		Sistem		10 Sistem	10.000.000	10 Sistem	10.000.000	10 Sistem	10.000.000	10 Sistem	10.000.000	30 Sistem	30.000.000						
	1 03 11 2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga terampil konstruksi yang terlatih		0 orang	0	orang	0	0 orang		1 orang	10.000.000	1 orang	10.000.000	1 orang	10.000.000	3 orang	60.000.000						
	1 03 11 2.01 06		Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan		0 orang	0	orang	0	0 orang		1 orang	10.000.000	1 orang	10.000.000	1 orang	10.000.000	3 orang	60.000.000						
	1 03 11 2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/	Jumlah sistem informasi jasa konstruksi yang terselenggara kabupaten		0 Dok	0	Dok	0	0 Dok		1 Dok	50.000.000	1 Dok	50.000.000	1 Dok	50.000.000	3 Dok	300.000.000						
	1 03 11 2.02 02		Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi		0 Dok	0	Dok	0	0 Dok		1 Dok	50.000.000	1 Dok	50.000.000	1 Dok	50.000.000	3 Dok	300.000.000						

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		AKHIR RPJMD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
								9	10	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
<b>1.2 Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum</b>																								
RPJMD 2021-2026	1 03 03		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Penduduk yang memiliki akses air minum	71,36 %		100 %		100 %		100 %	10.111.209.797	100 %	20.000.000.000	100 %	20.000.000.000	100 %	20.000.000.000	100 %	70.111.209.797	DPRKCK			
	1 03 03 2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sambungan Rumah (SR) yang mendapatkan layanan air minum	280.599 SR		SR	0	SR	0	200 SR	10.111.209.797	200 SR	26.615.309.912	200 SR	26.615.309.912	200 SR	26.615.309.912	281.399 SR	89.957.139.533				
	1 03 03 2.01 03		Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun		0 Liter/De	0	0 Liter/De	0	1.000 Liter/De	249.785.700	1.000 Liter/De	1.150.000.000	1.000 Liter/De	1.150.000.000	1.000 Liter/De	1.150.000.000	1.000 Liter/De	1.150.000.000	4.000 Liter/De	3.699.785.700			
	1 03 03 2.01 04		Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di kawasan perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat			SR		lokasi	90 SR	1.130.041.201	600 SR	13.021.491.260	600 SR	13.021.491.260	600 SR	13.021.491.260	600 SR	13.021.491.260	1.890 SR	40.194.514.981			
	1 03 03 2.01 06		Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terpasang air bersih pada kawasan Perdesaan									1.000 SR	5.000.000.000	1.000 SR	5.000.000.000	1.000 SR	5.000.000.000	1.000 SR	5.000.000.000	3.000 SR	15.000.000.000		
	1 03 03 2.01 07		Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu		0 SR		0 SR		70 SR	809.918.960	100 SR	550.000.000	100 SR	550.000.000	100 SR	550.000.000	100 SR	550.000.000	370 lokasi	2.459.918.960			
	1 03 03 2.01 11		Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa	Jumlah Kelompok Masyarakat yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi		1 kelompok		kelompok		15 kelompok	191.828.400	15 kelompok	1.500.000.000	15 kelompok	1.500.000.000	15 kelompok	1.500.000.000	15 kelompok	1.500.000.000	60 kelompok	4.691.828.400			
	1 03 03 2.01 19		Pertuasan SPAM jaringan perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah jaringan Sistem Penyediaan Air Minum yang diperluas di kawasan Perdesaan			lokasi		lokasi	15 lokasi	7.729.635.536	15 lokasi	5.393.818.652	15 lokasi	5.393.818.652	15 lokasi	5.393.818.652	15 lokasi	5.393.818.652	60 lokasi	23.911.091.492			
<b>1.3 Persentase Rumah Tangga Bersanitasi Aman</b>																								
RPJMD 2021-2026	1 03 05		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tinggal bersanitasi	76,25 %		%		%		100 %	18.770.771.656	100 %	30.000.000.000	100 %	30.000.000.000	100 %	30.000.000.000	100 %	30.000.000.000	100 %	108.770.771.656	DPRKCK	
	1 03 05 2.01		Pengelolaan dan Pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah SR dengan sanitasi layak	300.359 SR		SR	0	SR	0	200 SR	18.770.771.656	200 SR	30.000.000.000	200 SR	30.000.000.000	200 SR	30.000.000.000	200 SR	30.000.000.000	301.159 SR	108.770.771.656		
	1 03 05 2.01 06		Pembangunan atau penyediaan sub sistem pengolahan setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik								15.999.820.000		24.000.000.000		24.000.000.000		24.000.000.000		24.000.000.000				
				1. Jumlah MCK yang terbangun	86 Lokasi		1 lokasi		1 lokasi		30 lokasi		45 lokasi	9.000.000.000	45 lokasi	9.000.000.000	45 lokasi	9.000.000.000	45 lokasi	9.000.000.000	252 lokasi	27.000.000.000		
				2. Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki	2.064 Unit		Unit		Unit		800 Unit		1.500 Unit	15.000.000.000	1.500 Unit	15.000.000.000	1.500 Unit	15.000.000.000	1.500 Unit	15.000.000.000	7.364 Unit	45.000.000.000		
	1 03 05 2.01 10		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Dioperasikan dan Dipelihara			0 Lokasi		0 Lokasi				1 Lokasi	5.000.000.000	1 Lokasi	5.000.000.000	1 Lokasi	5.000.000.000	1 Lokasi	5.000.000.000	1 Lokasi	15.000.000.000		
	1 03 05 2.01 15		Pembangunan /penyediaan sarana dan prasarana IPLT	Kapasitas IPLT Terbangun			M3/Hari		M3/Hari		28 M3/Hari	2.770.951.656	28 M3/Hari	1.000.000.000	28 M3/Hari	1.000.000.000	28 M3/Hari	1.000.000.000	28 M3/Hari	1.000.000.000	112 M3/Hari	5.770.951.656		
	1 03 06		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase peningkatan drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	32 %						7 %	47.696.948										47.696.948		
	1 03 06 2 01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase di lingkungan permukiman								47.696.948		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		1.547.696.948		
	1 03 06 2 01 12		Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun							100 Meter	47.696.948	1.000 Meter	500.000.000	1.000 Meter	500.000.000	1.000 Meter	500.000.000	1.000 Meter	500.000.000		1.547.696.948		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		AKHIR RPJMD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
								9	10	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
<b>2.Terwujudnya Penyelenggaraan Penataan Ruang yang Berkelanjutan</b>																									
<b>2.1 Persentase Kesesuaian Rencana Tata Ruang</b>																									
RPJMD 2021-2026	1 03 12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Terselenggaranya penyusunan dokumen rencana tata ruang dan				0		0		1.173.320.256		6.340.000.000		6.824.000.000		7.356.000.000		21.693.320.256						
			Jumlah dokumen rencana tata ruang yang tersusun	1	Dok	Dok			Dok		5	Dok	5	Dok	1.500.000.000	5	Dok	1.500.000.000	6	Dok	1.500.000.000	21	Dok	4.500.000.000	DPRKCK
			Jumlah kecamatan yang telah memiliki rencana detail tata ruang	3	Kec	Kec			Kec		5	Kec	5	Kec	4.840.000.000	5	Kec	5.324.000.000	6	Kec	5.856.000.000	29	Kec	16.020.000.000	DPRKCK
	1 03 12 2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Terselenggaranya penetapan RTRW dan RRTR Kabupaten				0		0		740.390.620														
	1 03 12 2.01 01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota			Dok			Dok		1	Dok	2	Dok	1.000.000.000	2	Dok	1.000.000.000	0	Dok	0	5	Dok		
	1 03 12 2.01 02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota			Dok			Dok		1	Dok	2	Dok	1.000.000.000	2	Dok	1.000.000.000	0	Dok	0	5	Dok		
	1 03 12 2.01 04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang			Dok			Dok		1	Dok	1	Dok	340.000.000	1	Dok	824.000.000	1	Dok	356.000.000	4	Dok		
	1 03 12 2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen tata Ruang yang tertata			Kec	0		Kec	0	0	Kec	2	Kec	2.000.000.000	2	Kec	2.000.000.000	2	Kec	2.000.000.000	6	Kec	6.000.000.000	
	1 03 12 2.02 01	Kordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	0	0	Dok	0	0	Dok	0	0	Dok	2	Dok	1.000.000.000	2	Dok	1.000.000.000	2	Dok	1.000.000.000	6	Dok	3.000.000.000	
	1 03 12 2.02 02	Kordinasi dan sinkronisasi penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota			Dok	0	0	Dok	0	0	Dok	2	Dok	1.000.000.000	2	Dok	1.000.000.000	2	Dok	1.000.000.000	6	Dok	3.000.000.000	
	1 03 12 2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pemanfaatan ruang			Dok	0	0	Dok	0	1	Dok	200	Dok	100.000.000	200	Dok	100.000.000	200	Dok	100.000.000	800	Dok	466.810.000	
	1 03 12 2.03 01	Kordinasi dan Sinkronisasi pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah			Dok			Dok		200	Dok	200	Dok	100.000.000	200	Dok	100.000.000	200	Dok	100.000.000	800	Dok	466.810.000	
	1 03 12 2.03 02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan																						
	1 03 12 2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten / kota	terlaksananya Pengendalian Pemanfaatan Ruang			Dok	0	0	Dok	0	6	Dok	6	Dok	1.000.000.000	6	Dok	1.000.000.000	6	Dok	1.000.000.000	6	Dok	3.266.119.636	
	1 03 12 2.04 04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang			Dok			Dok		6	Dok	6	Dok	1.000.000.000	6	Dok	1.000.000.000	6	Dok	1.000.000.000	6	Dok	3.266.119.636	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		AKHIR RPJMD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi					
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp			
								9	10	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
<b>2.2 Presentase Penatagunaan Tanah</b>																												
RPJMD 2021-2026	2 10 10		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		Luas lahan bersertifikat		75 %					82 %	1.576.679.744	85 %	350.000.000	90 %	375.000.000	95 %	400.000.000	95 %	2.701.679.744	DPRKPKC						
	2 10 10 2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah sengketa tanah yang tertangani		Laporan	0		Laporan	0	100.000	Laporan	1.576.679.744	100.000	Laporan	1.000.000.000	100.000	Laporan	1.000.000.000	100.000	Laporan	1.000.000.000	400.000	Laporan	4.576.679.744		
	2 10 10 2.01 01		Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		Laporan			Laporan		100.000	Laporan	1.576.679.744	100.000	Laporan	1.000.000.000	100.000	Laporan	1.000.000.000	100.000	Laporan	1.000.000.000	400.000	Laporan	4.576.679.744		
<b>3. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Perumahan dan Permukiman yang Layak</b>																												
<b>3.1 Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perumahan dan Permukiman yang Tertangani</b>																												
RPJMD 2021-2026	1 04 03		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		Cakupan perumahan yang memiliki lingkungan sehat dan aman didukung PSU		11 Perumahan					10 Perumahan	401.580.750	10 Perumahan	240.000.000	10 Perumahan	260.000.000	10 Perumahan	280.000.000	51 Perumahan	1.181.580.750	DPRKPKC						
	1 04 03 2.01		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman		Jumlah kawasan perumahan yang dikembangkan terintegrasi secara elektronik		3 kws	0 kws	0	0	0	20 kws	254.236.250	20 kws	120.000.000	20 kws	120.000.000	20 kws	120.000.000	83 kws	614.236.250							
	1 04 03 2.01 01		Fasilitas Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik		3 Dok	Dok				20 Dok	254.236.250	20 Dok	120.000.000	20 Dok	120.000.000	20 Dok	120.000.000	83 Dok	614.236.250		Se-Kab Jember					
	1 04 03 2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) ha		Jumlah Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman		0 Laporan	0	0	0	0	10 Laporan	147.344.500	10 Laporan	120.000.000	10 Laporan	120.000.000	10 Laporan	120.000.000	40 Laporan	507.344.500	DPRKPKC	Se-Kab Jember					
	1 04 03 2.02 05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh		Laporan			Laporan		10 Laporan	147.344.500	10 Laporan	120.000.000	10 Laporan	120.000.000	10 Laporan	120.000.000	40 Laporan	507.344.500							
RPJMD 2021-2026	1 04 05		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		Terselenggaranya peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) di lingkungan permukiman				0		0		55.951.461.932		39.203.958.000		41.037.082.000		41.390.301.000		177.582.802.932							
					Cakupan luasan lingkungan permukiman kumuh		1.324,25 M <sup>2</sup>	M <sup>2</sup>		M <sup>2</sup>		178,03 M <sup>2</sup>	1.515.000.000	205,62 M <sup>2</sup>	1.515.000.000	406,50 M <sup>2</sup>	2.995.000.000	339,68 M <sup>2</sup>	2.995.000.000	0,00 M <sup>2</sup>	9.020.000.000	DPRKCK						
					Luas jalan lingkungan yang terbangun		708.334 M <sup>2</sup>	M <sup>2</sup>		M <sup>2</sup>		145.000 M <sup>2</sup>	16.886.461.932	145.000 M <sup>2</sup>	138.958.000	145.000 M <sup>2</sup>	142.082.000	145.000 M <sup>2</sup>	145.301.000	1.288.334 M <sup>2</sup>	17.312.802.932	DPRKCK						
					Jumlah RTH yang terpelihara		8 RTH	RTH		RTH		8 RTH	6.500.000.000	8 RTH	6.500.000.000	8 RTH	6.500.000.000	8 RTH	6.500.000.000	8 RTH	6.500.000.000	8 RTH	26.000.000.000	DPRKCK				
					Luas pemakaman yang terpelihara		8 Ha	Ha		Ha		8 Ha	900.000.000	8 Ha	900.000.000	8 Ha	900.000.000	8 Ha	900.000.000	8 Ha	900.000.000	8 Ha	3.600.000.000	DPRKCK				
					Jumlah titik lampu PJU yang dibangun		23.368 Titik	Titik		Titik		1.000 Titik	17.000.000.000	1.000 Titik	17.000.000.000	1.000 Titik	17.000.000.000	1.000 Titik	17.000.000.000	1.000 Titik	17.000.000.000	1.000 Titik	68.000.000.000	DPRKCK				
					Jumlah titik lampu PJU yang dipelihara		0 Titik	Titik		Titik		2.800 Titik	10.150.000.000	2.900 Titik	10.150.000.000	3.000 Titik	10.500.000.000	3.100 Titik	10.850.000.000	3.100 Titik	10.850.000.000	3.100 Titik	41.650.000.000	DPRKCK				
					Jumlah lokasi yang terelektifikasi		9 Lokasi	1 Lokasi		Titik		1 Lokasi	3.000.000.000	1 Lokasi	3.000.000.000	1 Lokasi	3.000.000.000	1 Lokasi	3.000.000.000	1 Lokasi	3.000.000.000	1 Lokasi	12.000.000.000	DPRKCK				
	1 04 05 2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		Persentase cakupan sarana dan prasarana yang didukung PSU		30 %	0 %		%		178 %	55.951.461.932	206 %	39.203.958.000	407 %	10.000.000.000	340 %	10.000.000.000	0 %	50.000.000.000							
	1 04 05 2.01 02		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang		31 lokasi	lokasi		lokasi		31 lokasi	55.951.461.932	31 lokasi	63.200.000.000	31 lokasi	63.300.000.000	31 lokasi	63.400.000.000	31 lokasi	298.981.404.616							

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		AKHIR RPJMD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
								9	10	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
				1 03 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase peningkatan jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)	62 %	%	%	%	3 %	63.407.578.485	5 %	0	5 %	0	5 %	0	80 %	63.407.578.485					
				1 03 10 2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah luas jalan lingkungan di kawasan permukiman yang terbangun	708.334 m²	m²	0	m²	0	243.295 m²	63.407.578.485	0 m²	0	0 m²	0	0 m²	0	951.629 m²	63.407.578.485				
				1 03 10 2.01 05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	708.334 m²	m²		m²		243.295 m²	63.407.578.485	0 m²	0	0 m²	0	0 m²	0	951.629 m²	63.407.578.485				

### 3.2 Persentase Rumah Layak Huni

RPJMD 2021-2026	1 04 03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Unit rumah dalam permukiman layak huni	6.355 Unit	Unit	300 Unit	Unit	300 Unit	4.130.771.900	300 Unit	6.000.000.000	300 Unit	6.000.000.000	300 Unit	6.000.000.000	7.855 Unit	22.130.771.900	DPRKCK		
	1 04 03 2.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Prosentase rumah layak huni	55 %	%	0	%	0	4.130.771.900	57 %	6.000.000.000	59 %	6.000.000.000	60 %	6.000.000.000	60 %	22.130.771.900			
	1 04 03 2.03 02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	6.355 Unit Rumah	0 Jnit Rumah	0 Jnit Rumah	0 Jnit Rumah	86 Jnit Ruma	4.130.771.900	300 Unit Ruma	6.000.000.000	300 Unit Ruma	6.000.000.000	300 Jnit Ruma	6.000.000.000	7.341 Jnit Ruma	22.130.771.900			
			APBD																	
			DAK																	
			CSR	25	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	
			BSPS	965	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	
RPJMD 2021-2026	1 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Unit rumah layak huni	38 Unit	Unit	Unit	Unit	10 Unit	355.735.000	100 Unit	5.500.000.000	100 Unit	5.500.000.000	100 Unit	5.500.000.000	348 Unit	16.855.735.000	DPRKCK		
	1 04 02 2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana/ relokasi program Kabupaten	0 kws	0 kws	0	0 kws	0	0	10 kws	250.000.000	10 kws	250.000.000	10 kws	250.000.000	30 kws	750.000.000			
	1 04 02 2.01 01	Identifikasi Perumahan di lokasi Rawan Bencana atau terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan. Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program	0 dok	0 dok	0	0 dok	0	0	1 dok	200.000.000	1 dok	200.000.000	1 dok	200.000.000	3 dok	600.000.000			
	1 04 02 2.01 04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	0 dok	0 dok	0	0 dok	0	0	10 dok	50.000.000	10 dok	50.000.000	10 dok	50.000.000	30 dok	150.000.000			
	1 04 02 2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana /relokasi program kabupaten	0	0 Unit	0	0 Unit	0	10 Unit	355.735.000	100 Unit	4.000.000.000	100 Unit	4.000.000.000	100 Unit	4.000.000.000	310 Unit	9.355.735.000		
	1 04 02 2.03 01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten /Kota yang Terehabilitasi	0	0 Unit Rumah	0	0 Unit Rumah	10 Unit Rumah	355.735.000	50 Unit Rumah	1.500.000.000	50 Unit Rumah	1.500.000.000	50 Unit Rumah	1.500.000.000	160 Unit Rumah	4.855.735.000			
	1 04 02 2.03 04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang	0	0 Unit Rumah	0	0 Unit Rumah	0	0	50 Unit Rumah	1.500.000.000	50 Unit Rumah	1.500.000.000	50 Unit Rumah	1.500.000.000	150 Unit Rumah	4.500.000.000			
	1 04 02 2.03 05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang	0	0 Unit Rumah	0	0 Unit Rumah	0	0	2 Unit Rumah	1.000.000.000	2 Unit Rumah	1.000.000.000	2 Unit Rumah	1.000.000.000	6 Unit Rumah	6.000.000.000			

Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni dan Berkelanjutan sesuai dengan Rencana Tata Ruang untuk Pemenuhan Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.

Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah

Persentase Indikator Program yang tercapai

RUTIN		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Indikator Program yang tercapai	0	0	0	0	49.967.125.954	53.040.327.417	51.740.327.417	51.740.327.417	206.488.108.205	DPRKCK							
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	10 Dok	Dok	0	Dok	0	10 Dok	581.236.890	10 Dok	612.151.290	10 Dok	612.151.290	10 Dok	612.151.290	10 Dok	2.417.690.760		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dok	Dok		Dok	10 Dok	581.236.890	10 Dok	612.151.290	10 Dok	612.151.290	10 Dok	612.151.290	50 Dok	2.417.690.760			

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		AKHIR RPJMD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
								9	10	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya pengadministrasian keuangan perangkat daerah sesuai dengan pedoman			0		0	9.933.754.841		10.978.836.564		10.978.836.564		10.978.836.564		42.870.264.533					
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/Bulan	Orang/Bulan		Orang/Bulan	14 Orang/Bulan	9.743.318.091	14 Orang/Bulan	10.294.899.854	14 Orang/Bulan	10.294.899.854	14 Orang/Bulan	10.294.899.854	14 Orang/Bulan	10.294.899.854	14 Orang/Bulan	40.628.017.653			
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dok	Dok		Dok	12 Dok		12 Dok	500.000.000	12 Dok	500.000.000	12 Dok	500.000.000	12 Dok	500.000.000	12 Dok	1.500.000.000			
					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																			
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	Laporan		Laporan	2 Laporan	17.955.500	2 Laporan	11.455.460	2 Laporan	11.455.460	2 Laporan	11.455.460	2 Laporan	11.455.460	8 Laporan	52.321.880			
					Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan																			
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD																			
					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	24 Dok	Dok		Dok	24 Dok	172.481.250	24 Dok	172.481.250	24 Dok	172.481.250	24 Dok	172.481.250	24 Dok	172.481.250	24 Dok	689.925.000			
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah			0		0	99.387.730		99.387.730		99.387.730		99.387.730		99.387.730		397.550.920			
					Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																			
					Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																			
					Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian																			
					Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																			
					Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Laporan		Laporan	2 Laporan	99.387.730	2 Laporan	99.387.730	2 Laporan	99.387.730	2 Laporan	99.387.730	2 Laporan	99.387.730	2 Laporan	397.550.920			
					Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik																			

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		AKHIR RPJMD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
								9	10	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya penyediaan barang dan jasa pada perangkat daerah		0		0		1.853.587.018		1.853.587.018		1.853.587.018		1.853.587.018		7.414.348.072					
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1 Paket	Paket		Paket		1 Paket	31.489.923	1 Paket	31.489.923	1 Paket	31.489.923	1 Paket	31.489.923		125.959.692				
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	Paket		Paket		1 Paket	837.367.525	1 Paket	837.367.525	1 Paket	837.367.525	1 Paket	837.367.525		3.349.470.100				
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga															0				
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Paket		Paket		1 Paket	595.317.420	1 Paket	595.317.420	1 Paket	595.317.420	1 Paket	595.317.420		2.381.269.680				
					Penyediaan Barang Cetak dan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	Paket		Paket		1 Paket	55.572.150	1 Paket	55.572.150	1 Paket	55.572.150	1 Paket	55.572.150		222.288.600				
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Perundangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															0				
					Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material															0				
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu															0				
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	Laporan	Laporan		Laporan		12 Laporan	333.840.000	12 Laporan	333.840.000	12 Laporan	333.840.000	12 Laporan	333.840.000	48 Laporan	1.335.360.000				
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip															0				
					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada															0				
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan									1.300.000.000						1.300.000.000				
					Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								1 Unit	700.000.000					2 Unit	700.000.000				
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau								1 Unit	500.000.000					2 Unit	500.000.000				
					Pengadaan Alat Besar	Tersedianya Alat Besar																			
					Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor																			
					Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan																			
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang								1 Unit	100.000.000										
					Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Aset Tetap Lainnya																			
					Pengadaan Aset Tak Berwujud	Tersedianya Aset Tak Berwujud																			
					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		0		0		34.449.901.506		35.147.106.846		35.147.106.846		35.147.106.846		35.147.106.846		139.891.222.044			
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Surat	Laporan		Laporan		12 Laporan	7.325.475	12 Laporan	7.325.475	12 Laporan	7.325.475	12 Laporan	7.325.475		29.301.900				
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Laporan		Laporan		12 Laporan	31.105.046.426	12 Laporan	31.802.251.766	12 Laporan	31.802.251.766	12 Laporan	31.802.251.766		126.511.801.724				
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Laporan	Laporan		Laporan		24 Laporan	188.500.089	24 Laporan	188.500.089	24 Laporan	188.500.089	24 Laporan	188.500.089		754.000.356				
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	Laporan		Laporan		24 Laporan	3.149.029.516	24 Laporan	3.149.029.516	24 Laporan	3.149.029.516	24 Laporan	3.149.029.516		12.596.118.064				

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal 2020	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		AKHIR RPJMD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
								9	10	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan			0		0		3.049.257.969		3.049.257.969		3.049.257.969		3.049.257.969		12.197.031.876				
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Unit		Unit		1 Unit	87.752.128	1 Unit	87.752.128	1 Unit	87.752.128	1 Unit	87.752.128		351.008.512				
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	63 Unit	Unit		Unit		63 Unit	2.393.578.535	63 Unit	2.393.578.535	63 Unit	2.393.578.535	63 Unit	2.393.578.535		9.574.314.140				
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																			
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor																			
					Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel																			
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
					Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																			
					Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																			
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		Unit		Unit		2 Unit	417.752.496	2 Unit	417.752.496	2 Unit	417.752.496	2 Unit	417.752.496	8 Unit	1.671.009.984				
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Lokasi	Lokasi		Lokasi		2 Lokasi	150.174.810	2 Lokasi	150.174.810	2 Lokasi	150.174.810	2 Lokasi	150.174.810		600.699.240				
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Tanah																			



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA**  
Jln. Srikoyo 1 No. 1 ☎. ( 0331 ) 425786 J E M B E R - 68111

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)  
TAHUN 2023**

**Nama OPD/Unit Kerja : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta karya Kabupaten Jember**

**RPJMD**

<b>Misi</b>	<b>Tujuan RPJMD</b>	<b>Indikator Tujuan</b>	<b>Sasaran RPJMD</b>	<b>Indikator Sasaran</b>
Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember	Terpenuhinya Infrastruktur Dasar yang Berkualitas dan Merata serta Berperspektif Kebencanaan	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	Terpenuhinya Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkualitas	1) Persentase rumah layak huni 2) Luasan permukiman kumuh kawasan perkotaan yang tertangani 3) Persentase rumah tangga berakses air bersih yang layak 4) Persentase rumah tangga bersanitasi yang aman 5) Persentase kesesuaian rencana tata ruang 6) Tersedianya rencana rinci untuk pedoman pengendalian pemanfaatan ruang 7) Luasan ruang terbuka hijau publik 8) Persentase luas lahan bersertifikat

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM/KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator Sub kegiatan (Output)	Target	Anggaran
Meningkatkan Kualitas dan kuantitas Infrastuktur perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang untuk pemenuhan pelayanan publik	Indeks Infrastuktur pelayanan Publik, perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan sesuai dengan rencana Tata ruang untuk pemenuhan pelayanan publik	1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastuktur perumahan dan permukiman yang layak huni dan merata	1.1 Persentase rumah layak huni	57%	<b>Program Kawasan Permukiman</b>	Unit rumah dalam permukiman layak huni	300 Unit				
					Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Prosentase rumah layak huni	57%	Perbaikan Rumah Tidak layak huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	300 Unit Rumah	4.130.771.900
					<b>Program Pengembangan Perumahan</b>	Penyelenggaraan Koordinasi dan Pembinaan Infrastruktur	7%				
					Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana/ relokasi program Kabupaten	10 kws	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	10 Unit Rumah	355.735.000

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM/KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator Sub kegiatan (Output)	Target	Anggaran
			1.2 Luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan yang tertangani	120,7 ha	<b>Program Kawasan Permukiman</b>	Cakupan perumahan yang memiliki lingkungan sehat dan aman didukung PSU	1.000 Unit				
					Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah kawasan perumahan yang dikembangkan terintegrasi secara elektronik	20 kws	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	20 Dokumen	254.236.250

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM/KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator Sub kegiatan (Output)	Target	Anggaran
					Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) ha	Jumlah Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	10 kws	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan \ Permukiman Kumuh	10 Laporan	147.344.500
					<b>Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)</b>	Luas pemukiman yang terpelihara	8 Lokasi				
						Jumlah titik lampu PJU yang dibangun	1.000 Titik Lampu				
						Jumlah titik lampu PJU yang dipelihara	2.800 Titik Lampu				
						Jumlah lokasi yang terelektifikasi	100 Lokasi				
						Luas jalan lingkungan yang terbangun	145,000 m <sup>2</sup>				

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM/KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator Sub kegiatan (Output)	Target	Anggaran
					Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah sarana dan prasarana utilitas umum yang terbangun	31 Lokasi	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	31 Lokasi	61.968.343.592
					<b>Program Penyelenggaraan Jalan</b>	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)	5%				
					Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan yang Dibangun	12 km	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	12 km	65.407.578.485
		1.3 Persentase rumah tangga berakses air bersih yang layak		81%	<b>Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</b>	Persentase penduduk yang memiliki akses air minum	100%				

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM/KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator Sub kegiatan (Output)	Target	Anggaran
					Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sambungan Rumah (SR) yang mendapatkan layanan air minum	200 SR	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun	1.000 Liter/Dayetik	249.785.700
								Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan dikawasan perdesaaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	250 SR	1.130.041.201
								Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan	50 SR	809.918.960

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM/KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator Sub kegiatan (Output)	Target	Anggaran
									perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu		
								Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Kelompok Masyarakat yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi	15 Kelompok Masyarakat	191.828.400
								Perluasan SPAM jaringan perpipaan di Kawasan Perdesaaan	Jumlah jaringan Sistem Penyediaan Air Minum yang diperluas dikawasan Perdesaaan	15 Lokasi	7.079.635.536

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM/KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator Sub kegiatan (Output)	Target	Anggaran
			1.4 Persentase rumah tangga bersanitasi yang aman	84%	<b>Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah</b>	Prosentase SR (sambungan rumah) yang terlayani sanitasi layak	100%				
					Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan sistem	Jumlah SR dengan sanitasi layak	200 SR	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	1.950 Rumah Tangga	12.649.820.000
					air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota			Pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana IPLT	Kapasitas IPLT Terbangun	5 M <sup>3</sup> /Hari	2.770.951.656
					<b>Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase</b>	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	1.000 M				

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM/KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator Sub kegiatan (Output)	Target	Anggaran
					Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	1.000 M	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	1.000 M	47.696.948
		2. Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan	2.1 Persentase kesesuaian rencana tata ruang	84%	<b>Program Penyelenggaraan Penataan Ruang</b>	Prosentase tata Ruang yang tertata	84%				
					Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	6 Rapat	Kordinasi dan Sinkronisasi pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	180 Perijinan	166.810.000

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM/KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator Sub kegiatan (Output)	Target	Anggaran
					Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten / kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	200 Dokumen	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	6 Dokumen	266.119.636
					<b>Program Penataan Bangunan Gedung</b>	Rasio bangunan ber-IMB	1.000 Rasio				
					Kegiatan Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten/kota, pemberian izin mendirikan bangunan	Jumlah gedung negara terbangun dan yang terhabilitasi	10 Gedung	Penyelenggaraan penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB), Sertifikat laik fungsi (SLF), Peran tenaga ahli bangunan gedung	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA),	1.000 Dokumen	784.346.110

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM/KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator Sub kegiatan (Output)	Target	Anggaran
					(IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung			(TABG), Pendataan bangunan gedung, serta implementasi SIMBG	Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG		
								Perencanaan, pembangunan, pengawasan, dan pemanfaatan bangunan gedung daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	25 Dokumen	666.000.000
								Pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung daerah kabupaten/kota	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan	25 Unit	12.280.892.080

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM/KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator Sub kegiatan (Output)	Target	Anggaran
			2.2 Tersedianya rencana rinci untuk pedoman pengendalian pemanfaatan ruang	15 Dokumen	<b>Program Penyelenggaraan Penataan Ruang</b>	Prosentase tata Ruang yang tertata	84%				
					Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	275.000.000
								Pelaksanaan Persetujuan Substansi Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	465.122.000
								Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan	4 Dokumen	268.620

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM/KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator Sub kegiatan (Output)	Target	Anggaran
			2.3 luasan ruang terbuka hijau publik	950 ha	<b>Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)</b>	Jumlah RTH yang terpelihara	8 RTH				
					Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah sarana dan prasarana utilitas umum yang terbangun	31 Lokasi	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	31 Lokasi	61.968.343.592
			2.4 Persentase luas lahan bersertifikat	50%	<b>Program Penatagunaan Tanah</b>	Persentase luas lahan bersertifikat	82%				

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM/KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator Sub kegiatan (Output)	Target	Anggaran
					Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sengketa tanah yang tertangani		Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Kali	1.576.679.744

Jember, Februari 2023  
**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,  
KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA  
KABUPATEN JEMBER**



**RAHMAN ANDA, ST, MT, M.Si.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19770524 200212 1 008



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT,  
KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA**

Jln. Srikoyo 1 No. 1 ☎. ( 0331 ) 425786 J E M B E R - 68111

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RAHMAN ANDA, ST,M.Si.

Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kab. Jember  
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jember, 21 November 2023

Pihak Pertama

Kepala Dinas Perumahan Rakyat,  
Kawasan Permukiman dan Cipta Karya  
Kabupaten Jember

Pihak Kedua  
BUPATI JEMBER,  
  
Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU

  
RAHMAN ANDA, ST, MT, M.Si.  
NIP. 19770524 200212 1 008

**PERJANJIAN KINERJA - PERUBAHAN TAHUN 2023**  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA**  
**KARYA KABUPATEN JEMBER**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan Kualitas Air Minum, Sanitasi layak, kuantitas Sarana dan prasarana Bangunan gedung yang tertata	➤ Prosentase bangunan gedung yang sesuai dengan standart teknis kontruksi	96 %
		➤ Persentase rumah tangga berakses air Minum	81 ha
		➤ Persentase rumah tangga bersanitasi yang aman	84 %
2.	Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan	➤ Prosentase kesesuaian rencana tata ruang	84 %
		➤ Prosentase Penatagunaan tanah	50 %
3.	Meningkatkan Kualitas dan kuantitas perumahan dan permukiman yang layak	➤ Luasan permukiman kumuh di kawasan perumahan dan permukiman yang tertangani	120,66 ha
		➤ Persentase rumah layak huni	91 %

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 61.714.384.854,-	P-APBD
2. Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp. 8.299.438.717,-	P-APBD
3. Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp. 18.026.349.732,-	P-APBD
4. Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp. 0,-	P-APBD
5. Drainase	Rp. 15.123.990.350,-	P-APBD
6. Penataan Bangunan Gedung Penyelenggaraan Jalan	Rp. 29.895.016.680,-	P-APBD
7. Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp. 1.070.903.228,-	P-APBD
8. Pengembangan Perumahan	Rp. 184.385.000,-	P-APBD
9. Kawasan Permukiman	Rp. 3.479.812.650,-	P-APBD
10. Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Rp. 23.817.515.549,-	P-APBD
11. Penatagunaan Tanah	Rp. 369.096.842,-	P-APBD
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 161.980.893.602,-</b>	

Jember, 21 November 2023

Pihak Pertama

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,  
KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA  
KABUPATEN JEMBER**



**RAHMAT ANDA, ST, MT, M.Si.**  
NIP. 19770524 200212 1 008

Pihak Kedua  
**BUPATI JEMBER,**



**Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU**



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT,**  
**KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA**  
JL. SRIKOYO I NO. 1 ☎ (0331) 425786 JEMBER - 68111

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,**  
**KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA**  
**KABUPATEN JEMBER**

**Nomor : 065/ 243/35.09.313/2023**

**TENTANG**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,**  
**KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA KABUPATEN JEMBER**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Jember;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Jember Kabupaten Jember

**KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Jember Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;

**KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :

- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
- (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi

**KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Jember Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:

- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
- b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
- c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
- d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah

**KEENAM** : Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Jember ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember  
Pada tanggal : 21 November 2023

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,  
KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA  
KABUPATEN JEMBER



**RAHMAN ANSA ST.,M.Si**

Pembina

NIP. 19770524 200212 1 008

## **INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

### **Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Jember**

- Instansi : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya
- Tugas : Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga pemerintah kabupaten dan perumusan kebijakan pengelolaan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta bidang Pertanahan, serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati
- Fungsi :
- a. Perumusan kebijakan dalam penyusunan program tata ruang dan pertanahan,
  - b. Pelaksanaan dan pengawasan bangunan gedung
  - c. Pelaksanaan penyehatan lingkungan permukiman
  - d. Pelaksanaan pemeliharaan perumahan dan permukiman
  - e. Pembinaan dan pengendalian terhadap penerangan jalan umum
- Tujuan : 1. Meningkatkan Kualitas dan kuantitas Infrastuktur perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang untuk pemenuhan pelayanan publik
- Indikator Tujuan : 1. Persentase capaian pelayanan infrastuktur dasar

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA KAB. JEMBER**  
**TAHUN 2023**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatkan Kualitas Air Minum, Sanitasi layak, kuantitas Sarana dan prasarana Bangunan gedung yang tertata	1. Prosentase bangunan gedung yang sesuai dengan standart teknis kontruksi	$\frac{\text{Jumlah bangunan gedung yang sesuai dengan standart teknis kontruksi (jumlah bangunan yang sudah ber PBG dan SLF)}}{\text{Jumlah Bangunan Gedung yang mengajukan izin PBG dan SLF}} \times 100$	Bidang Jasa Konstruksi, Penataan Bangunan Perumahan dan Pengembangan Kawasan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
		2. Persentase rumah tangga berakses air Minum	$\frac{\text{Jumlah KK yang memiliki sarana air minum}}{\text{Jumlah KK di Kab Jember}} \times 100\%$	Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
		3. Persentase rumah tangga bersanitasi yang aman	$\frac{\text{Jumlah KK bersanitasi layak}}{\text{Jumlah KK penduduk Jember}} \times 100\%$	Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
2	Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan	1. Prosentase kesesuaian rencana tata ruang	$\frac{\text{Realisasi RTRW}}{\text{Rencana Tata Ruang Wilayah}} \times 100\%$	Bidang Tata Ruang dan Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
		2. Persentase Penatagunaan Tanah	$\frac{\text{Jumlah sertifikat hak milik (SHM)}}{\text{Jumlah bidang Tanah}} \times 100\%$	Bidang Tata Ruang dan Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
3	Meningkatkan Kualitas dan kuantitas perumahan dan permukiman yang layak	1 Luasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang tertangani	Jumlah Luasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang tertangani	1. Bidang Jasa Konstruksi, Penataan Bangunan Perumahan dan Pengembangan Kawasan 2. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
		2 Persentase rumah layak huni	$\frac{\text{Jumlah Rumah Layak huni}}{\text{Jumlah bangunan Rumah}} \times 100\%$	Bidang Jasa Konstruksi, Penataan Bangunan Perumahan dan Pengembangan Kawasan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

